



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IX DPR RI
DENGAN KEPALA BADAN GIZI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

- Tahun Sidang : 2024-2025
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari & Tanggal Rapat : Selasa, 6 Mei 2025
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI
Acara : 1. Membahas evaluasi capaian implementasi Program Makan Bergizi Gratis hingga Triwulan II Tahun 2025;
2. Membahas tantangan koordinasi Badan Gizi Nasional dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah.
- Waktu : Pukul 10.15 s.d. 13.33 WIB
Ketua Rapat : drg. Putih Sari (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/F-P. GERINDRA)
Sekretaris Rapat : Ida Nuryati, S.Sos, M.A (Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI)
Hadir : **A. PIMPINAN DAN ANGGOTA:**
30 orang Anggota hadir dari 43 orang Anggota dengan rincian sebagai berikut:

I. PIMPINAN:

1. Charles Honoris (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/ F-PDI PERJUANGAN)
2. M. Yahya Zaini, S.H. (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/ F-P. GOLKAR)
3. drg. Putih Sari (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/ F-P. GERINDRA)

II. ANGGOTA:

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)**

4 orang Anggota dari 7 Anggota

1. Indah Kurnia, S.E., M.M.

2. Obet Rumbruren
3. Eko Kurnia Ningsih
4. H. Ahmad Safei, S.H., M.H.

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
(F-P. GOLKAR)**

5 orang Anggota dari 7 Anggota

1. Delia Pratiwi Sitepu, SH.
2. Ravindra Airlangga, B.A., M.S
3. Teti Rohatiningsih, S.Sos.
4. Dr. Ir. Heru Tjahjono, M.M.
5. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA
RAYA (F-P. GERINDRA)**

4 orang Anggota dari 5 Anggota

1. Ade Rezki Pratama, S.E., M.M
2. Ir. Sri Meliyana
3. Ir. H. Nuroji
4. Hj. Mariana, SAB., MM.

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
(F-P. NASDEM)**

4 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Irma Suryani, S.E., M.M.
2. Rahmawati Herdian, S.H., M.Kn.
3. Nafa Urbach
4. Nurhadi, S.Pd., M.H.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
(F-PKB)**

2 orang Anggota dari 4 Anggota

1. H. Asep Romy Romaya
2. Dr. Arzeti Bilbina Setyawan, S.E., M.A.P

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
(F-PKS)**

4 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si
2. drh. H. Achmad Ru'yat, M.Si
3. Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si
4. H. Alifudin, S.E., M.M

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
(F-PAN)**

2 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Ir. H. Sahidin
2. H.M. Muazzim Akbar, S.I.P

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
(F-P. DEMOKRAT)**

2 orang Anggota dari 3 Anggota

1. dr. Hj. Cellica Nurrachadiana
2. Tutik Kusuma Wardhani, S.E., M.M.,
M.Kes.

B. UNDANGAN:

1. Dr. Ir. Dadan Hindayana (Kepala Badan Gizi Nasional)
2. Mayjen (Purn) Lodewyk Pusung (Wakil Kepala Badan Gizi Nasional)
3. Brigjen (Purn) Sarwono, B.Sc., S.I.P., PSC (Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional)
4. Brigjen (Purn) Jimmy Alexander Adirman, S.E (Inspektorat Utama Badan Gizi Nasional)
5. Mayjen (Purn) Dadang Hendrayudha (Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional)
6. Dr. Ir. Tigor Pangaribuan (Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional)
7. Dr. Drs. Nyoto Suwignyo, M.M. (Deputi Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional)

JALANNYA RAPAT:

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.15 WIB)

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Iya, baik.

Bapak/Ibu sekalian.

Kita bisa mulai rapat kita hari ini.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,

Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

**Yang kami hormati Kepala Badan Gizi Nasional serta seluruh Jajaran,
Yang kami hormati Bapak/Ibu Anggota Komisi IX DPR RI.**

Alhamdulillah ke hadirat Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala* atas *rizki* dan perkenannya, kita semua pada hari ini bisa melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Badan Gizi Nasional dan sehat semua ya Bapak/Ibu ya. Sebelum kita rapat alangkah baiknya tentunya agar rapat ini bisa berjalan lancar dan sekaligus saya juga menyampaikan berita duka cita ya, ada rekan kami Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa saat ini beliau di Komisi XII ya tapi dulu pernah menjadi Anggota Komisi IX, yaitu Bapak Alamuddin, Gus Alam biasanya kami memanggil ya jadi, mohon perkenannya sekalian kita mengirimkan doa Al Fatihah untuk beliau semoga almarhum *husnul khotimah*. Berdoa dimulai.

(BERDOA)

Selesai.

Berdasarkan data dari Sekretariat Komisi IX, kehadiran anggota di rapat hari ini 14 anggota dari 7 fraksi dari 8 fraksi sehingga dinyatakan kuorum ya. Jadi, tentunya kita bisa mulai rapat pada hari ini. Untuk itu, selanjutnya saya meminta persetujuan agar agenda rapat kita pada hari ini dibuka dan juga rapat terbuka untuk umum. Dapat disetujui Bapak/Ibu sekalian?

(RAPAT: SETUJU)

Mengenai waktu rapat, ini kita akan mulai di jam 10.20 ya. Jadi, kami tawarkan kepada Bapak/Ibu semua rapat sampai dengan jam 12.00 siang ya. Apabila nanti diperlukan penambahan, akan kita sepakati lebih lanjut. Setuju ya sampai jam 12.00 Bapak/Ibu ya?

(RAPAT: SETUJU)

(rekaman terputus)

Evaluasi capaian implementasi Program Makan Bergizi Gratis sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan yang kedua, yaitu membahas tentang koordinasi Badan Gizi Nasional dengan berbagai pihak yang terkait ya, termasuk pemerintah daerah tentunya. Jadi, sebelum mendengarkan paparan dari Saudara Kepala Badan Gizi Nasional, Bapak/Ibu sekalian, kami tawarkan kembali ini ya

agar paparan yang akan disampaikan bisa disampaikan selama kurang lebih 20 menit. Bisa disetujui Bapak/Ibu semua? Cukup, Pak Kepala ya? 20 menit ya? Baik.

(RAPAT: SETUJU)

Kami persilakan kepada Bapak Kepala Badan Gizi Nasional untuk menyampaikan paparannya.

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL (Dr. Ir. DADAN HINDAYANA):

Terima kasih, Ibu Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om swastyastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,*

**Yang terhormat Pimpinan Komisi IX DPR RI,
Para Anggota Komisi IX DPR RI,
Para Pimpinan dari Badan Gizi, Pak Wakil, Pak Sestama, Pak Irtama, para
Deputi, dan para Direktur.**

Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita masih diberi panjang umur, kesehatan sehingga bisa berkumpul bersama pada rapat-rapat dengan pendapat tanggal 6 Mei dan izinkan saya untuk menyampaikan capaian yang telah dilakukan oleh Badan Gizi selama kurang lebih 4 tahun.

Sampai hari ini, ini data-data yang kami miliki yang secara digital kami munculkan ada di *website*, sampai hari ini sudah dilakukan makan bergizi pada 1.286 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 38 provinsi dan sudah melayani penerima manfaat 3.506.941 dan terdapat 19 kelompok mulai dari PAUD sampai seminari termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Jadi, cakupannya sudah lengkap termasuk juga di dalamnya ada beberapa sekolah luar biasa yang sudah kami layani. Ya kurang lebih ada 87 SLB. Demikian juga dengan pondok pesantren yang kurang lebih sudah dilayani 108 pesantren.

Selanjutnya pada tanggal 14 Mei ada potensi penambahan SPPG baru yang sedang kami verifikasi sebanyak 219 dengan estimasi total tambahan penerima manfaat kurang lebih 657.000. Dengan demikian, total SPPG yang nanti akan operasi pada tanggal 14 Mei kurang lebih 1.505 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang akan melayani kurang lebih 4.163.941.

Jadi, kami targetkan di pertengahan Mei sudah mencapai lebih dari 4 juta dan kami memiliki keinginan di akhir Mei, kita sudah bisa melayani 6 juta dan kemudian jumlah SPPG pada *milestone* yang pertama ini akan bertahan sampai bulan Juli melayani 6 juta karena seperti yang sering saya sampaikan, kunci sukses makan bergizi terdiri dari tiga. Yang pertama adalah anggaran, yang kedua SDM, yang ketiga infrastruktur.

Nah, anggaran ini *insya Allah* sudah diselesaikan disiapkan oleh Pak Presiden, meskipun untuk penambahannya belum dikonsultasikan dengan DPR, tetapi sudah disiapkan. Kemudian kunci sukses yang kedua adalah SDM. SDM ini makan bergizi identik dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi identik dengan kepala satuan pelayanan dan kepala satuan pelayanan identik dengan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia dan sampai sekarang kita baru selesai mendidik 1.994. Awalnya 2000, tetapi karena ada yang mengundurkan diri 6 sehingga 1.994.

Nah, kemudian pada saat sekarang, itu kami masih mendidik 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang baru akan selesai di per akhir Juli. Sehingga untuk bisa menyelenggarakan Program Makan Bergizi sampai Juli, kami baru bisa melayani kurang lebih 6 juta karena ada 1994 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang akan menjadi Kepala SPPG. Nah, nanti di bulan Agustus baru akan leluasa karena Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia sudah selesai dididik dan kunci ketiga adalah terkait dengan infrastruktur. Nah, infrastruktur ini sampai sekarang sampai dengan 1.286 itu 100% infrastruktur disiapkan oleh mitra. Jadi, Badan Gizi belum membangun satu pun infrastruktur untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kami sekarang baru dalam tahap untuk perencanaan dan sedang mencari lahan untuk pembangunan 1.542 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dibiayai oleh APBN.

Jadi, *alhamdulillah* program ini berjalan sampai sekarang itu semua berkat kemitraan dan jika kita mengandalkan kepada dana APBN semata, maka sebetulnya Program Makan Bergizi baru akan bisa dilaksanakan bulan Agustus, tapi karena kita mengembangkan pola kemitraan dan *alhamdulillah* sampai sekarang ada 1.286 yang sudah berjalan dan itu semuanya adalah mitra kita yang merupakan 100% UMKM. Mereka-mereka seluruhnya yang bekerja pada bidang *food and beverage* menyokong dengan sangat intens Program Makan Bergizi ini dan infrastruktur ini kelihatannya sekarang sedang bergerak cepat di masyarakat.

Jadi, kami sangat yakin bahwa Agustus sudah akan ada 7.000 fasilitas yang bisa kita gunakan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan kemudian kami akan tingkatkan dua kali lipat pada bulan September. Jadi, ini percepatan memang sedang kita lakukan untuk melayani 42,9, 42 juta. Kemudian Oktober kita sudah ingin melayani 66 juta dan November akhir, kita berharap bisa mencapai 82,9 juta sesuai dengan target dari Pak Presiden. Itu adalah tahapan-tahapan yang kami lakukan dan saat ini sampai bulan April, target kita sesuai dengan yang

direncanakan awal dan *insya Allah* Mei akhir atau awal Juni kita juga sudah akan bisa mengejar target sesuai dengan rencana awal.

Selanjutnya. Nah, kemudian kami perlu jelaskan bahwa mekanisme keuangan yang dilakukan pada Program Makan Bergizi adalah pola bantuan pemerintah. Jadi, pola bantuan pemerintah dilakukan karena ini adalah apa? Biaya sosial yang bisa dicairkan ke pihak perorangan atau ke kelompok masyarakat atau juga ke yayasan. Nah, Badan Gizi tidak mau ambil risiko dengan perorangan dan kelompok masyarakat, maka kemudian kami memilih yayasan. Dalam pola bantuan pemerintah, sebetulnya uang itu masuk ke rekening yayasan dan yayasan langsung bisa menggunakan, tapi Badan Gizi kemudian mengubah menjadi rekening masuk ke yayasan, tapi kemudian kami verifikasi melalui kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan sekarang kami ubah lagi dengan menggunakan *virtual account*. Jadi, ini adalah rekening bersama yang dibuat oleh Badan Gizi ketika mitra sudah ter-verifikasi sebagai mitra Badan Gizi, kemudian kita buat *virtual account* dan *virtual account* ini kemudian hanya bisa dicairkan oleh dua pihak, satu oleh perwakilan yayasan dan satu lagi oleh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan kita harapkan bahwa seluruh transaksi itu dilakukan melalui digital.

Jadi, hal-hal yang sedang kami benahi seperti ini dan bahkan sekarang itu tidak ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang boleh jalan duluan sebelum memiliki *virtual account* dan uang muka masuk 10 hari kemudian di rekening *virtual account*. Jadi, kalau tanggal 6 Januari sampai minggu kemarin, kami masih mengizinkan mitra menanggulangi dan sistem *reimburse* mulai sekarang tidak ada SPPG yang boleh jalan sebelum ada *virtual account* dan uang muka yang masuk untuk 10 hari ke depan. Jadi, sekarang sudah tidak ada lagi sistem *reimburse*. Yang ada sekarang hanya sisa-sisa yang sebelumnya dan sedang kami selesaikan. Mudah-mudahan bisa selesai minggu ini sehingga dari mulai minggu ini ke depan, seluruh transaksi menggunakan *virtual account* dan juga mitra-mitra bekerja dengan uang muka yang dikirim oleh Badan Gizi untuk 10 hari ke depan.

Jadi, kalau mitra ingin melaksanakan Program Makanan Bergizi pada tanggal 5 Mei ini, maka mitra dengan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi harus membuat proposal di tanggal 20 April. Nah, kemudian masuk ke kami, kemudian kami verifikasi. Nanti uangnya akan dikirim dari KPPN langsung ke rekening *virtual account*. Nah, begitu uang masuk ke rekening *virtual account*, maka pada tanggal 5 hari ini, kepala SPPG dan mitra sudah harus membuat proposal untuk tanggal 15. Siklusnya demikian.

Nah, kemudian pada tanggal 15, ketika uang muka sudah masuk, maka mitra dan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sudah harus membuat proposal untuk sampai tanggal, untuk tanggal 25 sambil membuat laporan penggunaan uang yang tanggal 5 sampai tanggal 10.

Jadi, nanti akan terlihat karena ada dua komponen, ada tiga komponen di dalam Program Makan Bergizi yaitu komponen bahan baku, komponen operasional, dan komponen insentif. Nah, bahan baku dan operasional sifatnya *at cost*. Jadi, kalau bahan baku tiba-tiba harga pasar murah, kemudian yang diusulkan contohnya 300 juta, kemudian digunakan 250 juta, maka yang 50 juta tidak menjadi bagian keuntungan mitra, tetapi digunakan untuk *carry over* sehingga pada tanggal 10 itu harus dilaporkan berapa uang bahan baku yang tersisa.

Jadi, pada saat mengusulkan untuk tanggal 25, nanti usulannya 300 juta, tetapi dicatat uang sisa 50 juta sehingga Badan Gizi nanti hanya mengirimkan sisanya 250 juta karena 50 juta sudah ada di rekening. Demikian prosesnya sehingga selalu ada di mana ketika uang itu sudah masuk, pada saat yang sama dia harus membuat proposal untuk 10 hari kemudian. Nanti 10 hari kemudian, ketika dia harus bikin usulan, maka sudah sekaligus melaporkan apa yang digunakan dari 10 hari sebelumnya.

Selanjutnya. Dan dengan *virtual account* ini, kami sangat yakin ya bahwa uang ini akan sangat mudah dipantau. Bahkan Kementerian Keuangan pun bisa melihat semua transaksi yang terjadi di *virtual account* masing-masing SPPG. Nah, meskipun nanti ada yayasan yang berafiliasi dengan institusi yayasan satu di seluruh Indonesia dan dia memiliki rekening yayasan satu di seluruh Indonesia, tetapi ketika dia mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, maka *virtual account*-nya satuan pelayanan dengan satuan pelayanan lain berbeda. Jadi, ini khusus *virtual account* untuk satuan pelayanan tersebut.

Dan kemudian kami juga melakukan perbaikan-perbaikan mekanisme operasional SPPG terutama setelah terjadi kasus di Kalibata di mana ada yayasan rupanya bukan pemilik fasilitas sehingga mereka ketika bekerja sama dengan Badan Gizi sudah memiliki perjanjian khusus di antara mereka. Sehingga Badan Gizi sudah mengirimkan uang ke yayasan, tapi yayasan belum menyerahkan kepada pemilik fasilitas sehingga timbullah masalah di publik dan sekarang kami perbaiki. Jadi, sekarang kami mengutamakan pemilik fasilitas yang akan jadi mitra. Kemudian kami akan tanya apakah mitra memiliki yayasan sendiri atau tidak. Jika kemudian menggunakan yayasan yang bukan milik sendiri, maka kami akan tanya apa ada perjanjian apa di antara yayasan dan pemilik fasilitas, tapi yang kami utamakan sekarang adalah seluruh pemilik fasilitas karena investasi dilakukan oleh pemilik fasilitas dan jika pemilik fasilitas belum punya yayasan, nanti Badan Gizi yang akan merekomendasikan yayasan-yayasan yang bisa digunakan sementara sebelum pemilik fasilitas memiliki yayasan sendiri.

Nah, kemudian untuk sementara ini, kami kemudian membatasi juga yayasan yang bisa mengelola SPPG untuk di wilayah satu provinsi, maka maksimal satu yayasan hanya boleh mengelola 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kalau lintas provinsi, maka hanya lima, kecuali untuk yayasan yang berafiliasi dengan institusi. Contohnya Eka Bayangkari atau yang berafiliasi dengan

angkatan darat tuh apa ya, Pak? Kartika, Kartika Eka Paksi seperti itu. Karena hanya satu di seluruh Indonesia dan kita tahu ketua dewan pimpinannya siapa sehingga kita bisa mudah berhubungan jika terjadi masalah. Contoh lain misalnya Muhammadiyah. Muhammadiyah satu di seluruh dunia, maka mereka sudah memiliki pokja khusus sehingga dimungkinkan untuk mengelola satuan pelayanan di seluruh Indonesia.

Selanjutnya. Nah, ini adalah skema alur verifikasi kita. Jadi, kita perbaiki sekarang skema alur verifikasinya dan jenjangnya cukup banyak. Pendaftaran menjadi mitra Badan Gizi hanya dilakukan melalui *website* mitra.bgn.go.id dan di situlah kemudian memasukkan seluruh informasi yang diperlukan. Kemudian kita akan verifikasi data entitas secara *online*. Kemudian kita akan kirim tim verifikator ke lokasi yang diajukan. Kemudian kita akan tugaskan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk melakukan survei Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kemudian juga setelah melakukan dia akan melaporkan dan kemudian di verifikasi oleh tim verifikasi di satuan di Badan Gizi Nasional. Kemudian kita akan tentukan apakah yang bersangkutan layak atau tidak. Kalau layak, maka kemudian kita akan tugaskan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia sebagai kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Jika sudah ada kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, maka Badan Gizi sudah bisa membuatkan rekening *virtual account* atau rekening *virtual*, rekening bersama. Kenapa? Karena yang memverifikasi orangnya harus sudah ada. Jadi, nomor telepon, email dan lain-lain. Kemudian juga bersama-sama dengan mitra menunjuk salah satu *person in charge*-nya untuk menjadi verifikator pada *virtual account*. Nah, kemudian setelah lengkap ada *virtual account*, maka mitra dan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, kemudian membuat proposal. Kemudian proposal itu dikirimkan ke Badan Gizi, kemudian diberikan PKS dan kemudian semua prosedur pengusulan dimasukkan ke dalam aplikasi SAKTI. Setelah disetujui, maka proses pencairan akan masuk langsung ke rekening *virtual account* tersebut. Itu mekanisme yang terjadi.

Selanjutnya. Ini kita lanjutkan saja karena sama penjelasannya. Selanjutnya. Nah, ini realisasi anggaran sampai sekarang. Jadi, Badan Gizi memiliki anggaran 71 triliun dan sampai hari ini kita baru bisa menyerap 2,386 triliun. Jadi, baru kurang lebih 3,36%, terkait dengan pegawai baru 0,01%. Perlu Ibu/Bapak ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji. Jadi, ini kenapa penyerapannya di bidang pegawai masih rendah? Karena yang baru kami keluarkan untuk sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, ahli gizi, dan akuntan. Jadi, kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji sehingga nanti pencairan di bidang pegawai ini akan lebih cepat setelah bulan depan. Kemudian untuk makan bergizinya sendiri ini baru 4,16%. Untuk modal masih 0% karena kami masuk dalam taraf perencanaan.

Selanjutnya. Saya kira, ini hampir sama ya. Ini hanya pembidangan saja. Satu di bidang pendidikan, untuk ibu hamil, untuk anak sekolah, sementara ibu hamil di bidang kesehatan masyarakat. Jadi, hanya pembagiannya saja.

Selanjutnya. Kita langsung ke rencana penyerapan. Ini per bidang, per deputi.

Selanjutnya. Nah, ini kurang lebih penyerapan yang akan terjadi sampai Desember. Jadi, kami memiliki target bulan Juni itu sudah 4,7 triliun yang kami serap, kemudian akan melonjak pada bulan Juli mencapai 16 triliun, kemudian Agustus itu akan sudah 28 triliun. September kita akan menyerap kurang lebih 51 triliun, kemudian Oktober 60 triliun, November 88 triliun, dan Desember 116 triliun. Jadi, kami masukkan bukan hanya anggaran yang 71 triliun yang sudah disetujui, tapi kami buat mekanisme penyerapan anggaran termasuk yang diminta oleh Pak Presiden terkait dengan percepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta. Jadi, makan bergizi ini jika mengikuti mekanisme yang sudah kami rencanakan akan membutuhkan anggaran kurang lebih 116,6 triliun untuk memberikan pelayanan kepada 82,9 juta. Jadi, kalau sekarang ada 71 triliun, tambahan 50 triliun sudah akan cukup untuk bisa melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember.

Berikutnya. Nah, ini adalah beberapa kasus kejadian bukan. Tadi saya sudah diingatkan oleh Bu Irma jangan disebut keracunan. Nanti tolong di itu. Kasus kejadian dari Program Makan Bergizi. Yang pertama, yang besar sebetulnya dulu tanggal 13 yang operasional tanggal 31 Januari di Sukoharjo. Ini penyebabnya sebetulnya teknis karena ini baru mulai. Jadi pada saat masakan sudah diolah, pada saat mau menggoreng gasnya habis. Itu kejadian yang pertama dulu di Sukoharjo dan sampai sekarang *alhamdulillah* tidak pernah terjadi lagi karena sudah disiapkan lebih baik dan waktu itu yang terdampak ada 40 siswa karena petugas sangat cepat mengidentifikasi ada kelainan di makanan itu sehingga kemudian masakan ditarik kembali dan diganti dengan telur sehingga yang terdampak 40 siswa.

Nah, kemudian terjadi di Batang. Nah, di Batang ini memang kejadiannya masakan dalam keadaan baik, kemudian dikirim dengan tepat waktu, tetapi kemudian di sekolah ada acara sehingga makanan itu terlambat di makan oleh siswa. Jadi, sebetulnya saat itu makanannya dalam keadaan baik. Kalau makan tepat waktu sebetulnya tidak akan kejadian.

Nah, kemudian berikutnya yang Cianjur. Nah, Cianjur ini sudah hampir minggu ketiga dan kami sudah mendapatkan hasilnya. Ada dua sekolah yang terdampak dari sekolah, sembilan sekolah, yaitu dari 72 siswa yang terdampak dari 2.701 dan hasilnya sudah keluar dari lab baik itu untuk *tray*-nya, untuk airnya, untuk fasilitas termasuk untuk masakan yang waktu itu dikonsumsi oleh siswa termasuk muntahannya dan *alhamdulillah* seluruh hasilnya negatif. Jadi, kami

sedang mencari kurang lebih apa sih sebetulnya yang menyebabkan, karena dari segi masakan dari hasil lab itu negatif.

Nah, kemudian dalam beberapa hari ini terjadi lagi di Bandung. Nah, ini di Bandung ini sebetulnya ada SPPG yang tadinya restoran yang kemudian dikonversi menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan kemudian *chef*-nya pun adalah *chef* restoran. Jadi, sebetulnya dari segi kualitas makanan higienis sudah sebetulnya memenuhi syarat, tapi ada beberapa siswa yang terdampak. Kami sampai sekarang belum dapat laporan, tapi baik yang di Bandung maupun di Tasik maupun di PALI yang baru terjadi itu karena masakan terlalu awal dimasak dan tidak cepat untuk bisa di-*delivery*, sehingga dengan kejadian-kejadian seperti ini, kami kemudian melakukan perbaikan-perbaikan SOP.

Selanjutnya di antaranya adalah kita menginginkan agar pemilihan bahan baku lebih selektif. Karena ini baru terjadi di PALI, di mana ikan itu diterima hari Jumat, kemudian dimasukkan ke dalam *freezer*, kemudian pada saat memasak dikeluarkan dan kemudian diolah setengah matang. Setelah diolah setengah matang, masuk lagi ke dalam *freezer*, kemudian diolah dan setelah dites dalam keadaan baik, tapi terjadi di lapangan sehingga kami kemudian memutuskan pemilihan bahan baku harus lebih selektif, mungkin lebih *fresh* akan lebih baik.

Kemudian dengan beberapa kejadian di mana masak terlalu awal dan menimbulkan kejadian, kami ingin menerapkan aturan bahwa waktu memasak dan penyiapan makanan dengan waktu pengiriman harus dipersingkat karena untuk mencegah terjadinya basi.

Kemudian kami juga meningkatkan protokol keamanan saat proses pengantaran dari SPPG ke sekolah. Kemudian kami juga akan terapkan toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Jadi, kalau makan jam 09.00, 09.15, kurang 15 sudah harus sampai dan tidak lebih dari 15 sampai 30 menit makanan itu harus segera dikonsumsi. Jadi, tidak ada lagi penundaan.

Nah, kemudian kami juga ingin menerapkan mekanisme distribusi sekolah termasuk penyimpanan penyerahan kepada siswa yang lebih singkat dan kami ingin menetapkan kewajiban uji organoleptik di sekolah sebelum makanan ini dibagikan. Jadi, nanti kami akan tugaskan orang tertentu untuk melakukan uji organoleptik dan dari beberapa kejadian ini, saya awalnya punya prognosis seperti kejadian di Sukoharjo, karena baru dimulai dan belum terbiasa sehingga makanan basi, tetapi kemudian kami sekarang mengalami bahwa yang di Cianjur, kemudian di Bandung termasuk di PALI itu adalah SPPG-SPPG yang sudah 2-3 bulan beroperasi. Jadi, karena baru pertama kali terjadi, mereka mungkin menganggap bahwa segala sesuatunya berjalan normal sehingga terjadi kelengahan-kelengahan. Oleh sebab itu, Badan Gizi kemudian membuat program penyegaran dan pelatihan penjamah makanan secara rutin pada Sabtu dan Minggu.

Jadi, seperti yang di Cianjur, di Tasik itu kami sudah kumpulkan untuk dilatih kembali. Nanti di PALI, di Palembang, minggu depan kami akan kumpulkan untuk dilatih kembali dan pelatihan ini kelihatannya harus dilakukan rutin minimal 2 bulan sekali supaya kelengahan-kelengahan itu tidak terjadi. Sama seperti misalnya kami hanya ingin memberikan *insight* pengalaman di luar negeri. Selanjutnya. Ternyata kejadian-kejadian juga ada dan tidak terjadi pada saat awal dan rata-rata terjadi juga justru setelah lama. Contoh di Mesir misalnya, itu mulai program tanggal tahun 1991 kejadiannya 2017. Di situ bahkan ada 3.353 siswa yang sakit ya dan 435 lainnya terdampak setelah 26 tahun.

Kemudian di Tiongkok bahkan ada beberapa yang meninggal itu setelah 10 sampai 13 tahun. Di Jepang setelah 49 tahun kejadian. Jadi, ini kelihatannya pengalaman-pengalaman negara lain yang harus kita selalu acu karena, karena sudah menjadi rutinitas, kemudian terjadi kelengahan sehingga kami sudah selalu harus memberikan penyegaran kepada para penjamah makanan tersebut.

Demikian juga di Finlandia setelah 80 tahun, di Amerika Serikat setelah 51 tahun, di Republik Dominika 7 tahun, di Afrika Selatan 20 tahun, di Inggris bahkan 99 tahun, dan di India juga terjadi setelah 18 tahun. Ini adalah contoh-contoh kejadian di negara lain yang menjadi pelajaran bagi kita bahwa setelah sukses dengan pelayanan 2-3 bulan, mereka tetap harus diberi penyegaran agar makanan ini betul-betul bisa dinikmati oleh para siswa dan dalam keadaan bersih, higienis, sehat, dan menyehatkan. Karena target dari Badan Gizi adalah nol kejadian dan ini kami sedang berusaha meningkatkan seluruh prosedur agar kejadian itu tidak terjadi kembali.

Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om swastyastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Waalaikumsalam.

Terima kasih, Pak Kepala, atas paparan yang sudah disampaikan. Selanjutnya untuk mendapatkan masukan-masukan yang lebih konkret ya, kami persilakan kepada Bapak/Ibu Anggota Komisi IX untuk bisa menyampaikan tanggapan ataupun juga pertanyaan, ya. Di sini sudah ada daftar penanya. Pertama, saya berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Achmad Ru'yat dari Fraksi PKS. Bersiap, Ibu Irma Suryani.

F-PKS (drh. H. ACHMAD RU'YAT, M.Si):

Bisa dimulai Bu, ya?

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Silakan, Pak.

F-PKS (drh. H. ACHMAD RU'YAT, M.Si):

Baik, terima kasih Ibu Pimpinan.

**Para Pimpinan Komisi IX, dan juga
Para Bapak/Ibu Komisi IX DPR RI, serta
Kepala Badan Gizi Nasional Prof. Dadan Hindayana beserta para Deputi
Direktur dan Jajaran yang berbahagia.**

Yang pertama, dari presentasi yang tadi disampaikan bahwa serapan anggaran dari angka 71 triliun itu baru terserap 3,6% ya. Yang pertama, ini mungkin perlu dilakukan suatu kajian, karena kalau mencermati kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto ini kan sangat, sangat strategis, sangat memberikan manfaat bagi penerima manfaat dan ini sudah tercantum dalam Asta Cita yang harus kita sukseskan, ya. Jadi, ini komitmen saya sebagai Anggota Fraksi PKS bagaimana mendukung penuh program janji kampanye Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, kira-kira kalau mendiagnosis ya persoalan ini kira-kira penyebab utamanya di mana nih, Pak? ya, sampai serapannya lambat ya. Padahal animo masyarakat ini sangat tinggi ya.

Saya tadi agak terenyuh juga ya, gaji pegawai katanya belum optimal, Pak ya? Atau tunjangan kinerjanya ada tidak, Pak? Belum ada? Nah, ini mungkin ini yang kami soroti karena kinerja para jajaran ini kan luar biasa ya. Para deputi ya, para direktur siang malam mungkin setiap saat terima banyak komplain ya. Padahal ini kan suatu tugas yang mulia ya, tetapi faktor penunjang ya biasanya kan ada tunjangan kinerja. Sampai saat ini belum ada, Pak? Nah, mohon kira-kira perlu ada payung hukumnya, Pak, ya dibuat segera. Kira-kira sampai sekarang kenapa kendalanya belum ada setingkat perpres lah, ya, perpres untuk tunjangan kinerja bagi katakanlah teman-teman yang di Badan Gizi Nasional ini ya dan kami yakin mungkin di antara jajaran di sini juga ada yang berasal dari kementerian, lintas kementerian ya kan. Jadi, ini mungkin, Pak sehingga kami berharap dalam waktu yang tidak lama payung hukum ya untuk tunjangan kinerja. Karena ini berpengaruh, Pak, ya. Karena kalau tunjangan kinerja tidak ada, kemudian tadi juga di Prof. Dadan Hindayana menyampaikan gaji juga mungkin belum, belum lancar begitu Pak ya? Ya, jadi, bagaimana bisa menggerakkan mesin organisasi BGN ini dengan baik. Jadi, ini mungkin yang catatan yang pertama, Pak.

Kemudian yang kedua, kami yakin bahwa animo masyarakat ini sangat tinggi dan tidak semuanya bisa di-cover, ya kan dengan keterbatasan anggaran yang ada. Sampai sejauh mana BGN bisa melakukan mediasi. Banyak pasti perusahaan-perusahaan ya yang punya CSR yang ingin berpartisipasi melakukan kolaborasi. Jadi kita ingin *update progress*-nya, Pak. Ya karena ini sangat penting dari Sabang sampai Merauke dan kami berharap ada *update* juga, Pak, mungkin melakukan suatu *scanning environmental* terhadap penerima manfaat ya. Apakah mungkin daerah-daerah yang ber, yang kira-kira jumlah *stunting*-nya cukup, cukup menjadi perhatian ya. Jadi, itu harus menjadi prioritas.

Kemudian yang ketiga, kami ketika reses ke Pesantren Nurul Iman di Kabupaten Bogor di Parung, itu kami berjumpa dengan 15.000 santri, Pak. Jadi, Pesantren Nurul Iman Parung ini pesantren yang gratis ya dan santrinya itu para, para duafa ya, orang-orang yang memang tidak mampu dan digratiskan ya. Jadi, sesuai dengan yang sudah dipublikasikan pihak pesantren melalui yayasan di pesantren tersebut secara legal formal berbadan hukum sudah melakukan *input*, Pak, terhadap *website* yang disediakan oleh Badan Gizi Nasional, tetapi *progress*-nya sangat lambat, Pak. Jadi, padahal itu sudah dilakukan mungkin di bulan Februari ya. Jadi, kami mohon dibantu, Pak, supervisi karena itu daerah pemilihan saya Jabar 5 Kabupaten Bogor dan kami melihat itu harus menjadi prioritas ya, karena santrinya yang 15.000 itu betul-betul para duafa ya yang orang-orang yang mungkin relatif ekonominya sangat, sangat lemah ya kan dan digratiskan.

Mungkin demikian, Pak, komentar singkat yang dapat kami sampaikan. Kami apresiasi atas segala kerja keras ya, kerja cerdas, ke sungguh-sungguhan Kepala Badan Gizi Nasional beserta jajaran di deputi dan juga direktur, dan juga seluruh staf dari BGN yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti saya ketemu lagi sudah ada tukinnya, Pak. Ya, ya, saya bisa me, saya 13 bersaudara, 8 saudara kandung tuh PNS, Pak. Ya, kalau enggak ada tukinnya ya lumayan. Paling *basic* gaji yang ada juga tadi katanya belum lancar juga ini bagaimana bisa bekerja, Pak? Ya kan.

Terima kasih, Prof. Dadan Hidayana.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Terima kasih, Pak Achmad Ru'yat,

Selanjutnya Ibu Irma Suryani. Bersiap, Pak Muazzim.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E., M.M.):

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan Komisi IX, dan
Kawan-kawan Komisi IX yang saya hormati,
BGN dan seluruh Jajaran yang saya hormati.**

Kalau soal anggaran tadi sudah dibahas oleh Pak Ru'yat. Saya mau bicara soal kasus nih. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi justru saya melihatnya BGN baru tahu dari media. Nah, ini sebetulnya enggak boleh terjadi. Harusnya kasus-kasus itu disampaikan oleh sekolah terkait ya, sekolahan terkait dengan atau dapur umum terkait kepada BGN secara langsung. Jangan sampai media dulu yang tahu begitu ya, BGN belakangan. Nah, setelah media ribut baru BGN menyelesaikan. Menurut saya itu enggak profesional itu. Itu harus mulai diubah itu ya. Kontrolnya harus ketat di BGN justru. Dapur umum yang harus melaporkan begitu atau guru ke dapur umum, dapur umum kan di dapur umum tuh ada orang BGN ya kan, ada orang kita, maka BGN, tidak orang dapur umumlah yang harus melaporkan kepada BGN sehingga enggak kemudian BGN langsung menindaklanjuti sehingga media enggak goreng sana goreng sini, kalau menurut saya ya, karena mereka kan juga dapat informasi begitu, tapi kalau dari dapur umum yang melaporkan secara langsung melalui sekolah, nah itu justru lebih konstruktif laporannya.

Nah, yang kedua, saya melihat justru saya lihat di paparan tadi NTT itu enggak dilaporkan, padahal justru NTT itu paling banyak bermasalah. Ini saya dapat laporannya ini terkait di NTT nih, banyak sekali nih ya. Jadi, Februari ada 15 anak SD di Kota Waingapu, Sumbawa. Sumba, Nusa Tenggara Timur, kemudian ada lagi di 19 Februari, kemudian di tanggal berapa lagi ini? Ini banyak sekali ini yang laporannya masuk ke saya nih. Nah, Pak, ini harus benar-benar menjadi perhatian, Pak. Daerah-daerah yang mohon maaf ya, daerah-daerah yang miskin ini betul-betul harus jadi perhatian. Jangan sampai kemudian vendor menganggap mereka biasa cuma makan, mohon maaf ya, makan yang ini saja sudah cukup ya kasih ini saja lah begitu atau ah mereka biasa nih makannya begini ya enggak apa-apa ya ini saja sudah cukup enggak bisa begitu.

Nah ini justru yang, yang saya khawatirkan ini begitu, maka vendor-vendor di daerah-daerah tersebut harus vendor-vendor yang sangat profesional, begitu. Kalau vendor-vendor daerah tidak mampu memberikan yang terbaik bagi mereka, ya harus ada penanganan khusus di situ, Pak Dadan. Jadi, ini yang sering terjadi banget nih. Saya sudah ini terima banyak nih, Pak. Mungkin yang Bapak belum tahu nih. Nanti saya langsung apa namanya? Saya *forward* ke Bapak ya. Nah, jadi ini justru malah lebih berbahaya lagi begitu ya, di daerah-daerah yang kondisi rakyatnya memang miskin. Ini vendornya justru harus lebih bagus begitu. Jangan nanti dianggap, "Wah, ini makan begini saja sudah mereka sudah senang nih," begitu. Enggak bisa begitu. Jadi, vendornya harus betul-betul vendor yang profesional.

Nah, untuk memastikan itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan dan masukan khususnya juga. Apa langkah konkret yang telah diambil oleh BGN untuk memastikan bahwa Program BGN tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan siswa. Yang kedua, bagaimana BGN memastikan bahwa semua mitra penyedia makanan BGN memenuhi standar keamanan pangan yang ketat, ya. Kemudian yang ketiga, apakah BGN memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk menindaklanjuti setiap laporan keracunan makanan ya terkait MBG, walaupun saya sebenarnya tidak setuju dengan istilah keracunan ya, Pak, ya. Karena definisinya enggak cocok *sih* dengan kejadian-kejadian yang ada begitu ya, tapi ya itu harus menjadi perhatian, perhatian penting ya oleh BGN begitu. Kemudian apakah tindak, tindakan yang diambil oleh BGN terhadap pengelola dapur yang terbukti lalai dalam menjaga kualitas makanan MBG.

Selanjutnya, bagaimana BGN berkoordinasi dengan instansi terkait seperti BPOM dan Dinas Kesehatan dalam menangani kasus ya, kasus keracunan makanan di sekolah-sekolah ya. Banyak anak-anak yang makan makanan-makanan basi, yang ada makanannya basi, tidak matang. Nah, kalau dia tidak matang, Pak, memang rawan, Pak, masuk bakteri di situ. Nah, ini juga harus menjadi perhatian. Apakah BGN berencana ya, apakah BGN berencana untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh mitra penyedia makanan BGN di wilayah yang rawan keracunan atau rawan terjadi kasus? Nah, ini NTT ini juga salah satu yang harus benar-benar di apa namanya, diawasi secara ketat, juga daerah-daerah lain yang termasuk daerah-daerah miskin. Ini juga penting *banget* nih ya. Jangan sampai nanti “ah ini orang-orang ini makannya cuma begini saja dikasih sudah senang.” Enggak bisa begitu, ya. Harganya harus tetap sama sesuai dengan harga yang ada di daerah tersebut. Kan begitu konsepnya. Jangan kemudian malah dikurangi justru harusnya ditambah untuk apa namanya daerah-daerah rawan tersebut.

Kemudian bagaimana BGN memastikan bahwa distribusi makanan MBG dilakukan dengan memperhatikan aspek kebersihan dan keamanan pangan. Nah, ini terkait juga dengan vendor-vendor yang me, apa namanya memberikan atau apa ya menyampaikan atau vendor-vendor yang mendistribusikan bahan-bahan pokok, bahan-bahan makanannya kepada dapur umum. Ini juga harus diteliti.

Nah, kemudian apakah langkah-langkah preventif yang dapat diambil oleh BGN untuk mencegah terulangnya kasus-kasus yang terjadi selama ini untuk masa depan. Tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini terjadi, walaupun saya ya terus-terang karena saya ini juga punya *catering* begitu ya, kejadian basi itu mau di-*zero*-kan menurut saya juga kayaknya sulit, Pak, ya, tapi minimal harus dikontrol seketat mungkin begitu. Kadang-kadang ada.

Nah, sebelum itu terjadi harusnya ya, sebelum makanan itu didistribusikan, seharusnya guru juga diikutsertakan untuk melakukan kontrol. Nah, sebelum itu sebelum sampai ke guru, begitu keluar dari dapur umum dikontrol lagi supaya

makanan basi ini enggak sampai ke anak-anak untuk di makan. Kalau sudah basi ya jangan didistribusikan. Nah, kalau sudah itu yang dilakukan, maka *zero accident* baru bisa dicapai begitu. Kontrolnya ya, kuncinya ada di dalam kontrol. Di dalam kontrol.

Nah, kemudian apa langkah-langkah preventif yang akan diambil oleh BGN untuk mencegah terulangnya kasus, kasus-kasus yang, yang sering selama ini terjadi? Apakah ada satgas khusus ya? Apakah ada apa institusi khusus yang akan melakukan kontrol terkait dengan kasus-kasus yang terjadi selama ini. Kemudian apakah BGN memiliki rencana untuk melibatkan pihak ketiga yang independen dalam melakukan audit kualitas makanan MBG.

Terakhir, bagaimana BGN memastikan bahwa Program MBG tetap berjalan efektif dan aman bagi siswa, terutama di daerah-daerah dengan tantangan logistik dan sumber daya manusia yang terbatas. Penting, Pak, untuk melakukan juga pengawasan terhadap provinsi-provinsi yang tadi saya sebut. Sekali lagi, kenapa saya berulang-ulang mengatakan ini? karena di sanalah banyak terjadi kasus-kasus yang selama ini terjadi dan tidak terpublikasi karena dia daerahnya terpencil. Jadi daerah-daerah yang agak sulit apa namanya media masuk itu sulit, sulit dilaporkan kejadian-kejadiannya padahal kejadian-kejadian di sana banyak. Nah, harusnya dapur-dapur umum yang ada di sana jangan justru ditutup-tutupi, harusnya dilaporkan.

Nah, untuk vendor yang sudah melakukan kesalahan atau sudah melakukan terjadi kasus tiga kali saya kira harus dilakukan *punishment*, kalau perlu pemutusan hubungan kerja, karena artinya mereka tidak profesional. Saya kira itu saja catatan saya, tapi sekali lagi tentu kami ingin menyampaikan bahwa program ini memang disambut sangat-sangat antusias oleh seluruh rakyat Indonesia, tetapi kalau kontrolnya tidak baik, tidak ketat, ya kemudian pemilihan apa menu ya, pilih pemilihan menu itu juga enggak bagus begitu ya. Saya kira ini juga akan menjadi masalah, begitu. Jadi, variasi menu juga harus banyak, Pak. Disesuaikan dengan daerah masing-masing. Kalau di dapil saya, Pak, lebih banyak senang makan ikan daripada makan daging. Nah, misalnya di daerah lain mungkin lebih senang ayam daripada ikan atau ya itu juga perlu menjadi perhatian khusus begitu ya. Jangan semua disamaratakan. Itu saja yang ingin saya sampaikan.

Terima kasih, saya tutup dengan,

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thoriq,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Walaikumsalam.

Terima kasih, Bu Irma. Lanjut, Bapak Muazzim Akbar. Bersiap, Pak Heru. Silakan.

F-PAN (H.M.MUAZZIM AKBAR, S.I.P):

Terima kasih, Ibu Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IX yang saya hormati,
Kepala BGN, Deputy, dan seluruh Jajaran yang saya hormati.**

Alhamdulillah tadi sudah disampaikan bahwa hari ini agenda kita adalah evaluasi kinerja BGN selama triwulan pertama. Ya, kaitan dengan tadi sudah disampaikan oleh dua teman kita masalah anggaran yang baru bisa terealisasi hanya 3% dari 71 triliun. Nah, bagaimana ini anggaran yang begitu besar bahkan hampir seluruh kementerian itu sudah terjadi efisiensi anggaran, bahkan anggaran yang diberikan oleh pemerintah ini kepada BGN luar biasa bahwa ini adalah salah satu memang program prioritas Presiden Prabowo makan bergizi gratis ini.

Nah, saya melihat hari ini, ini kita akan ada bom waktu bahwa makan bergizi gratis ini realisasinya enggak seperti yang kita harapkan. Saya terutama sekali di NTB betul-betul saya turun. Dari 30 SPPG yang ada di NTB itu, ya jujur hampir 40% itu sebagian juga ada yang kader kami yang DPRD Kabupaten ya yang membangun SPPG dan lain sebagainya, dan termasuk juga seperti yang disampaikan sama Ibu Irma tadi, begitu banyak SPPG yang saya melihat masih asal-asalan ya, kurangnya pengawasan dari BGN. Bahkan saya tanya sama SPPG-nya, kalau ada keluhan dia bingung mau mengeluh ke mana begitu. Karena penanggung jawab di masing-masing provinsi atau kabupaten/kota itu enggak ada. Jadi, kalau ada masalah dia mau mengeluh ke mana?

Salah satu contoh yang saya memang melihat langsung. Begitu ada anak SD terima makannya itu di buah itu ada ulat sampai teriak. Nah, siapa yang harus bertanggung jawab? Yang kedua, anak SMP. Anak SMP dikasih buah jeruk itu asal-asalan jeruknya. Jadi, jeruknya waduh kecutnya minta ampun yang kecil-kecil itu. Yang ketiga, nasinya begitu diterima oleh siswa itu kerasnya minta ampun. Apakah kualitas berasnya yang memang hanya beli beras murah yang penting dapat untung banyak atau bagaimana? Nah, ini yang perlu coba kita evaluasi kaitan dengan serapan anggaran. Yang kedua dengan kurangnya pengawasan terhadap SPPG yang sudah berjalan.

Usul kami mungkin kita coba ubah sekarang pola kemitraan. Bagaimana Badan Gizi Nasional ini bermitra dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Karena yang punya rakyat, yang punya semua-semuanya itu adalah pemda. Jadi, kalau bisa dari Badan Gizi Nasional ini ada pola kemitraan atau kerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah daerah itu luar biasa punya aset

yang di mana-mana. Bisa kerja sama mereka punya aset di masing-masing sekolah dan mereka akan tahu. Kalau kita akan mengubah pola kemitraan dengan pemerintah daerah, maka mereka bertanggung jawab terhadap apa yang ini dibandingkan kita membangun kemitraan dengan orang per orang begitu, agak susah begitu, itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu kita butuhkan SPBG kurang lebih 30.000, tapi sekarang saja baru ada realisasi sekitar 1.200 sekian. Masih kita butuh lagi SPPG sekitar 28.000. Apa bisa ini? Tetapi, kalau kita membangun kemitraan dengan pemerintah daerah, *insya Allah* ini akan bisa kita realisasi dengan cepatnya.

Ya, tadi saya sudah singgung kaitan dengan penanggung jawab di masing-masing provinsi, kita juga ingin tahu begitu. Karena yakin kami Anggota Komisi IX ini di masing-masing dapil itu kita ingin tahu begitu. Di samping kami juga program sosialisasi makan bergizi sebagai Anggota Komisi IX ini, kami ingin tahu juga penanggung jawab di provinsi itu siapa, penanggung jawab di kabupaten itu siapa begitu, supaya enak kita bisa berkomunikasi dan menjalankan tugas kami sebagai anggota dewan untuk mengawasi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang ada di daerah.

Yang terakhir, di NTB itu baru berjalan SPPG 30 bukan 49. Saya cek itu kok saya jalan kaki, ya. Dari Bima dari 10 kabupaten/kota itu, saya sudah cek ya. Jadi, saya betul-betul *concern* untuk makan bergizi gratis ini untuk di NTB ya, karena sudah *brand*-nya di sana itu, kalau mau tanya makan bergizi gratis itu, itu tanya sama Pak Muazzim. Padahal saya enggak tahu apa-apa, makanya saya jalan terus. Ada di sini, Pak Kombes Iwan hadir? Kebetulan Putra Lombok juga itu. Pak Lalu Iwan, Asisten Deputi, iya. Jadi, saya sering komunikasi sama beliau selaku putra asli Lombok yang ada di BGN. Jadi itu mungkin usul saya. Jadi karena masih banyak teman-teman yang mau menyampaikan.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

*Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilirrasyad,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Walaikumsalam,

Terima kasih, Pak Muazzim. Dipersilakan, Pak Heru. Bersiap, Pak Nurhadi.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang terhormat Pimpinan Komisi IX,
Teman-teman Komisi IX yang kami cintai,**

Kepala Badan beserta Jajaran yang saya hormati.

Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang pertama, Pak Kepala Badan, kami mendengarkan rapat kabinet kemarin, Bapak mendapatkan apresiasi dari Pak Presiden karena hampir 99,9% Program Badan Gizi Nasional berhasil. Dari itu maka, Bapak harusnya turun ke lapangan, apakah betul dan itu harus dipertanggungjawabkan karena bagaimana juga yang disampaikan Bu Irma, Pak Muazzim, teman-teman yang lain, ada hal-hal yang terjadi di lapangan.

Tentunya sebelum kami menyampaikan yang lain agar tidak lupa seperti yang keracunan, Pak. Yang keracunan itu bukan hanya disembuhkan lho, Pak. Karena tugas saya bukan dokter yang dokter ada mungkin. Karena bakteri ini harus diikuti. Anak ini keracunan sampai berapa bulan dokter mengecek. Bukan, karena kalau itu bakteri sampai di lambung, itu bisa 3, 4, 5 bulan kemarin akan muncul dan ini harus di cek ulang, diikuti. Saya minta yang keracunan-keracunan tadi seperti yang disampaikan Bu Irma dan Pak Muazzim, terus diikuti perkembangan anak. Karena bagaimanapun juga ini anak sekolah, anak sekolah. Kalau sampai terkena dengan anak-anak kita, kita juga enggak mau. Jangan dianggap gampang dan jangan dibandingkan dengan negara yang lain. Ini mati sekian, keracunan, jangan. Ini adalah hal yang sangat sensitif dan berbahaya agar Bapak bisa memberikan kepercayaan Bapak Presiden kepada Pak BGN.

Pak Kepala BGN.

Mohon maaf sekali lagi, kami bukan mengkritisi, tapi teman-teman Komisi IX ini ingin membantu program Bapak agar berhasil betul dan mohon maaf lho, di sini banyak pengalaman. Ada yang anggota DPR lama, yang bupati juga banyak. Bekas Ketua Tim Penggerak PKK juga ada di sebelah saya ini. Banyak, artinya itu bupati banyak. Artinya tahu lapangan, tahu lapangan. Yang birokrasi banyak juga. Bapak kan baru dari dosen masuk ke BGN kan baru beberapa bulan, sebelumnya kan dosen, ya, itu. Makanya ini menjadi sebuah masukan bagi Bapak untuk program *panjenengan* biar bisa dikeroyok. Jadi, bahasa Jawanya ini, masyarakat itu *mangayubagyo* programnya Pak Presiden. *Mangayubagyo* ini apa? Berbahagia, gembira, ikut berpartisipasi, agar keren nih, agar proyeknya presiden ini terus berjalan, apalagi Bill Gates mau datang untuk melihat itu dan ini pernyataan Bapak Presiden 99,9% Bapak berhasil itu harus dipertanggungjawabkan di lapangan dan saya sampaikan bahwa Bapak sudah ada Perpres Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional Pasal 41 yang mana pasal ini bisa dibuat Bapak untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah di bawahnya provinsi, kabupaten, dan kota. Disampaikan tadi Bu Irma ada apa namanya satgas.

Beberapa waktu yang lalu Pak Yahya Zaini juga ada satgas. Sebagai contoh ini, tapi bukan *apple to apple*. Kita menangani Covid-19 waktu itu Pak Luhut. Pak Luhut yang menjadi komandannya. Saya saat itu menjadi komandan di Jawa Timur. Satgas itu dibikin, Pak, satgas kabupaten satu, satgas kota, satgas provinsi. Agar Bapak tidak susah, ketua satgasnya adalah sekda kabupaten, sekda kota, sekda provinsi.

Apa yang disampaikan Pak sebelah saya, Pak Muazzim, koordinasi *penjenengan* biar gampang dan itu bisa melakukan *monitoring* setiap saat, dua minggu sekali. Sekarang *monitoring* apa? Deputinya dibagi Pak, tupoksinya deputi kembalikan lagi. Jadi, deputi melakukan evaluasi melalui satgas. Katakan minggu ini Satgas Evaluasi *Monitoring*. Deputi *monitoring* melakukan koordinasi dengan aparat di daerah. Enggak usah diundang, Pak, pakai Zoom Meeting. Waktu kita menangani Covid-19, setiap Jumat itu kami rapat dengan Pak Luhut menangani Covid-19. Iya, tanyakan ada masalah apa agar tidak terjadi seperti keracunan yang disampaikan Bu Irma tadi. Lah, kalau itu dilakukan Bapak sudah saya sampaikan dulu, Pak, bikin aturan yang ke bawah agar Bapak bisa memanggil bupati, bisa memanggil *sek anu* gubernur, bisa memanggil wali kota. Melalui apa? Satgas. Pak Yahya Zaini sudah lama menyampaikan harus ada satgas. Kalau ini enggak, Bapak enggak kerja sama dengan yang lain, enggak *iso*, Pak, enggak bisa. *Iki kudu dikeroyok* karena ini *quick win*, mohon maaf saya enggak *ngritisi*.

Kami ingin membantu Bapak-bapak, teman-teman yang ada di Komisi IX ini turun. *Alhamdulillah* ada, ada apa namanya sosialisasi. Itu mereka sosialisasi tanya contohnya mohon maaf ini ada Pak Deputi, Pak, Pak Deputi, Pak Nyoto pernah turun dengan saya. Mohon maaf, saya enggak menyampaikan apa yang dikatakan tadi. Iya makanannya, ada satu anak saya tanya, kayaknya enggak ada itu, "enggak enak mangane." Saya dekati, "kenapa, Mas kok enggak enak?" "enggak enak." Ngomong, "jeruknya kecut." Lho, "kenapa kok kecut?" Saya dekati, saya dekati.

Dan yang kedua kalau kita datang, Pak, di desa, di kabupaten, enggak usah dikabari, Pak, *incognito* saja. Kalau dikabari nanti sekolahnya bariskan anaknya itu kecil-kecil ambil tepuk-tepuk, ini yang kacau, belum menyuguhi lagi. Ada kepala BGN datang, *wah* disuguhi, *halah* berapa ini, *incognito* saja datang. Lah, *incognito* bisa dilakukan kalau Bapak koordinasi dengan aparatur setempat. Aparatur setempat ini yang tahu, Pak. Kepala Dinas Kesehatan tahu, Kepala PMD tahu, Pendidikan tahu, Danramil, Kapolsek tahu. Lah ini ya, kalau Bapak sudah saya sampaikan, "Pak, tolong bikin satgas." Saya dua bulan yang lalu kan menyampaikan, kalau ndak, ndak bisa, Pak, enggak bisa.

Sudahlah. Saya ini mohon maaf, aku jadi pegawai negeri mulai tahun 1989, Pak, pensiun 2022. Jadi, paham, PNS paham, paham. Saya 1989 jadi PNS *wis* melalui kepala dinas macam-macam sampai dari sekda, paham, Pak, paham saya. Bupati juga dua periode. Jadi paham, paham. Jadi apalagi Bapak dari dosen, jadi Kepala BGN. Kalau Bapak *ndak* mau membagi dengan deputinya ini yang

sesuai dengan tupoksi, enggak akan jalan. Ini *anu* lho, Pak, Pak, Pak Dadan, kami bukan mengkritisi, tapi ingin membantu. Membantu agar penilaian apresiasi dari Bapak Presiden ini betul-betul di lapangan. Kalau enggak kasihan Pak Presiden, Pak. Kasihan Pak Presiden. Betul.

Nah, oleh sebab itu, Bapak, termasuk *panjenengan* harus juga punya peta sekolah mana yang miskin. Lah, bisa peta sekolah miskin siapa yang bikin-bikin? Jangan Bapak menurunkan dari pusat, minta ke daerah dan mohon maaf ya, bupati, wali kota, aparatur di daerah kalau dilibatkan dia akan ikut berpartisipasi, Pak. Sebagai contoh saya dengan kemarin dengan BKKBN. BKKBN sudah menyampaikan tentang berapa yang harus dicukupi melalui BGN dalam rangka menciptakan anak-anak kita emas 2045 termasuk adalah penanggulangan *stunting*.

Siapa yang tahu *stunting* itu? BKKBN dan Dinas Kesehatan. Bagaimana terjadinya *stunting*? Bukan hanya *ujuk-ujuk stunting*, tapi dari catinnya calon pengantin. Siapa yang melakukan itu? BKKBN. Bapak masuk ke situ. Di mana BKKBN? Di daerah ada. Lah kalau Bapak koordinasi dengan di daerah, jalan, enteng, Pak. Bapak *panjenengan* tinggal begini saja, Jumat, Deputi A, Zoom Meeting dengan seluruh orang di Indonesia. Itu yang dilakukan Pak Luhut pada saat kita melaksanakan Covid-19. Setiap Jumat, sudah. Karena ini apa? Program Presiden yang sudah diakui oleh dunia dan ini harus betul-betul di lapangan dilakukan. Mohon maaf lho, Pak. Saya ini sekali lagi mohon maaf.

Yang selanjutnya, setelah ketahuan bahwa mana SD yang mampu dan tidak mampu, pemerintah itu tidak harus 100% membiayai kebutuhan masyarakat karena harus ada partisipasi dan ini bentuknya adalah bentuk zaman dulu adalah padat karya. Anggap saja seperti itu. Lah kalau *panjenengan* melibatkan bupati, wali kota, kepala daerah gampang, Pak. Bupati menyampaikan, “Eh Pak, tolong ini ada ini, kurangnya berapa, Pak Kades?” Kepala desa dilibatkan, posyandu dilibatkan, muslimat apa, Al Fatayat, Aisyiyah dilibatkan. Mereka akan jalan, Pak.

Saya turun, Pak, mohon maaf. Saya bukan hanya sosialisasi lho, mohon maaf. Saya ke lapangan, Pak, saya ke lapangan. Ini lho, Pak (suara tidak jelas). Ada SPPG yang baru dua bulan pembatasnya dapur itu, lho. Harusnya ini *kan* enggak lengket. Lengket, Pak. Harusnya buka, ini lengket, kotor. Dua bulan saya ngomong, “Mbak, ini kalau panjenengan enggak bersihkan, harusnya ini kuat satu tahun karena kotor kompornya jadi kuatnya setengah tahun, investasinya menjadi banyak. Itu baru.” Ini Pak Nyoto ada itu Pak Deputi? Dengan, malah di situ ada Danramil. Ada Danramil, ada kepala, ada Pak Camat, ada tokoh masyarakat. Ajak saja ngomong. Di mana, “Bagaimana Pak? Mboten ngertos Pak kulo sampeyan iso membantu untuk partisipasi. Ayo coba diinventaris.” Punya telur berapa, punya sayur berapa, punya beras agar aturan yang 6 kilo dari SPPG itu tercapai dan yayasan itu, mohon maaf apa yang disampaikan deputi, yayasannya juga jangan ribet-ribet.

Di dalam waktu yang cukup panjang nanti, perlu menjadi kajian. Kajiannya dari mana? Dari Bapak melakukan *monitoring* dan evaluasi. Melalui apa? Koordinasi dengan pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi. Kalau, kalau di dalam kajian ini perlu mengubah desain, ya enggak apa-apa. Asal *outcome*-nya bagus. Umpama, “Oh ini kok dengan SPPG kok tidak harus semuanya SPPG. Sebagian dikembalikan lagi ke kantin sekolah yang dulu ada program kantin sehat dan jujur.” Itu bisa dilakukan. mereka bisa memilih. Mana yang harusnya kasih makan, mana yang tidak kasih makan, artinya subsidi silang. Yang mampu enggak perlu dikasih dan ini memang kayaknya sulit, tapi lakukan. Saya pernah jadi PNS, Pak. Jadi, percayalah, tahu *lakoni* saya. Ada yang namanya di program sepiring apa namanya sepiring, sepiring yang program BKKBN itu. Karbohidrat berapa? Isi piringku, “Isi Piringku” itu ada dan itu sudah jalan Isi Piringku untuk ibu hamil berapa, untuk anak sekolah berapa. Ini yang kekuatan penggerak, penggerak PKK hafal mestinya. Lah, *overall*, Pak, secara keseluruhan Bapak sudah menjalankan dengan baik. Namun demikian, hal-hal yang sifatnya perlu dikoordinasikan, koordinasikan.

Terakhir, Pak, Bapak harus menggunakan deputi-deputi yang Bapak punya untuk melakukan koordinasi. Deputinya juga harus *ngantor* di BGN. *Ojo* sampai deputinya keluar ke kantor. Terus termasuk yang terakhir adalah *account virtual*. Jadi, ini semuanya bisa dilakukan apa tidak. Yang di daerah-daerah belum bisa, enggak pakai bisa menggunakan QRIS enggak bisa itu harus bisa dipelajari karena semuanya tidak bisa menggunakan apa namanya *virtual account* dan itu perlu di, di tidak semuanya diketahui. Prinsipnya, Pak Kepala BGN, *boso jowone ya*, masyarakat ini harus *mangayubagyo* programnya Pak Presiden. *Mangayubagyo ya opo?* Senang.

(PERGANTIAN KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Artinya apa ini?

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.):

Partisipasi ya, *mangayubagyo* itu begini, Pak, *mangayubagyo* itu senang ikut berpartisipasi *hanggar beni*, keroyokan, kurang membantu itu. Itu filsafatnya begitu. Jadi, Pak Presiden menyampaikan 99,9% *panjenengan* harus tanggung jawab. Kondisi yang disampaikan Bu Irma keracunan itu harus dibenarkan dan ingat lho, Pak, kalau anak *panjenengan*, anak-anak kita keracunan mau enggak? Kan enggak mau kan. Jangan dianggap enteng. Karena keracunan sekarang itu dampaknya bisa lima bulan kemudian, dampaknya bisa enam bulan kemudian, dan ini perlu dikoordinasikan dokter.

Yang terakhir.

KETUA RAPAT (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Pak Heru, tolong diperhatikan waktunya.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.):

Ya. Siap.

Terakhir. Yang terakhir, pada saat masak ada yang keracunan, apakah yang masak itu seperti Bu Irma tadi, diperiksa APH apa *ndak*? Soalnya kalau saya pernah dulu waktu jadi bupati, susunya jelek langsung diperiksa ya. Nah, Pak, itulah sekali lagi Pak BGN mohon maaf, saya sekali lagi Bapak harus koordinasi dengan pemerintah daerah setempat biar Bapak enteng, biar Bapak enteng. Bapak ini tinggal di laptop, Jumat *virtual*. Sudah.

Terima kasih, Pimpinan, mohon maaf.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat bekerja dan bertugas, walaupun tukiknya belum turun.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Waalaikumsalam.

Terima kasih, Pak Heru. Pak Heru ini bupati dua periode, Pak. Sekda tujuh tahun Jawa Timur. Makanya lapangannya hafal beliau tentang birokrasi.

Baik, selanjutnya Pak Nurhadi. Siap-siap, Bu Tuti Kusumawardani.

F-P. NASDEM (NURHADI, S.Pd., M.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang saya hormati Pimpinan, dan
Yang saya cintai seluruh Anggota Komisi IX DPR RI,
Yang saya hormati Bapak Prof. Dadan beserta seluruh Jajaran.**

Pertama, saya mengapresiasi terkait penanganan cepat beberapa kejadian keracunan di beberapa wilayah atas respons cepat dan langkah sigap untuk menangani insiden ini. Ini menjadi bukti bahwa BGN tidak hanya responsif

tapi juga adaptif terhadap situasi darurat yang berkaitan dengan gizi dan keamanan pangan. Namun demikian, saya menilai sudah saatnya diterapkan mekanisme *punishment* seperti yang disampaikan Bu Irma tadi. Secara tegas kepada penyedia SPPG yang terbukti melanggar standar keamanan pangan, terutama jika pelanggaran itu dilakukan berulang.

Kemudian yang kedua, saya juga mengapresiasi. Ini beberapa SPPG yang saya sidak dengan tim BGN, ini mengeluhkan terkait pembayaran yang sering terlambat, Pak. *Alhamdulillah* sudah ada langkah antisipatif dan inovatif perbaikan mekanisme pembayaran yang melalui sistem *virtual account* berbasis skema *at cost*. Ini menurut saya merupakan pendekatan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip efisiensi belanja negara. Kami berharap sistem ini terus diperkuat, tidak menimbulkan keterlambatan maupun potensi *fraud* di lapangan.

Yang ketiga, terkait dengan proses validasi dan verifikasi pembayaran SPPG, Pak. Dengan semakin bertambahnya jumlah dapur SPPG, saya ingin menanyakan ke Bapak, sejauh mana kesiapan SDM BGN dalam proses validasi dan verifikasi klaim pembayaran ini. Mungkin secara profesional, secara proporsional dan profesional, idealnya ini satu petugas menangani berapa SPPG, Pak? Mohon dijelaskan.

Berikutnya terkait beberapa muncul berita di media yang menyampaikan ada banyak kantin di sekolah yang merasa dirugikan dan kita juga melihat laporan Pak Prof. Dadan tadi sampai hari ini sudah ada 1.286 SPPG yang aktif dan sebagian besar dari mitra UMKM, Pak, ya. Nah, dalam konteks pemberdayaan ekonomi dan keberlanjutan program, saya mengusulkan agar BGN juga secara aktif mendorong SPPG ini melakukan *recruitment* tenaga kerja lokal bisa dari kantin, Pak, atau dari dapur sekolah. Di mana sekolah ini yang terdampak itu, Pak. Ya, jadi ini bukan hanya solusi lapangan kerja, tapi juga bagian dari strategi menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis ini.

Terakhir. Dengan anggaran 71 triliun yang mayoritas ini untuk melakukan pembayaran SPPG di seluruh Indonesia. Saya yakin, saya merasakan dan optimis kalau tidak tahun ini ya tahun depan pasti pertumbuhan ekonomi akan tumbuh. Nah, saya berharap bagaimana BGN ini juga melakukan sebagai apa ya, sebagai penggerak ekosistem gizi dan kearifan lokal.

Saya mendorong agar BGN mengambil peran strategis dalam menciptakan ekosistem pangan yang sehat dan berbasis kearifan lokal. Tidak semata-mata sebagai pengadaan bahan pangan, tapi juga diwujudkan contoh ini, Pak, penyerapan beras ini ada semacam himbauan dari BGN untuk penyerapan petani lokal atau dari gabungan kelompok tani. Jangan sampai beras itu mengambil dari tengkulak atau grosir yang paling besar di kabupaten itu, Pak. Setidaknya di kampung saya kalau di Blitar, beras itu tidak keluar dari Blitar, dari Kediri. Blitar, Kediri itu beras tidak keluar dari Kediri karena sudah terserap di dapur tersebut.

Karena selama ini yang kami lihat imbauan dari BGN ini hanya *recruiter*, *recruitment* karyawan itu sekitar, tapi kaitannya dengan pemberdayaan pangan ini masih belum. Kemudian kayak sayur, lauk-pauk, bahan pokok lain, gula, minyak dan lain sebagainya, ini juga demikian, Pak, bisa mengangkat kearifan lokal.

Saya kira, itu Pimpinan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thoriq,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pak Nurhadi.

Selanjutnya, Ibu Tuti. Bersiap-siap, Ibu Netty.

F-P. DEMOKRAT (TUTIK KUSUMA WARDHANI, S.E., M.M.,M.Kes):

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi IX beserta seluruh Anggota Komisi IX,
Yang saya hormati Kepala Badan Gizi Nasional beserta seluruh Jajarannya.**

*Om swastiastu,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Namo buddhaya,
Salam kesejahteraan untuk kita semua.*

Saya tentu sangat mengapresiasi dengan peta jalan yang sudah diperbaiki ini, Pak. Tentu ini karena sudah adanya hasil evaluasi terhadap kendala-kendala yang ada di lapangan. Tetapi sampai saat ini di lapangan masih, Pak, saya rasakan masih *terseok-seok*, Pak. Yang saya ingin beri masukan, Pak, jangan terlalu banyak aturan-aturan yang *complicated*. Seperti contoh, Pak, ada Koperasi Merah Putih. Dapur harus belanja ke koperasi, sedangkan saya sendiri, Pak, sebagai Ketua Wanita Tani, saya sudah terus sosialisasi kepada petani, peternak bahwa kalian semua akan mendapatkan uang *cash* dibayar oleh dapur SPPG ini. Karena biasanya petani, peternak itu *supply* ke, ke supermarket dibon selama kurang lebih satu bulan. Jadi, saya sudah membahagiakan semua petani bahwa semua hasilnya akan terserap.

Jadi, menurut saya, lebih baik SPPG ini diberikan keleluasaan langsung dia mempunyai *supplier* yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena saya tahu

banyak sekali, Pak, wanita-wanita tani di desa itu dia melakukan pembinaan. Bagaimana dengan adanya dapur ini sudah kegembiraan yang luar biasa, Pak, karena dia sudah pasti produksinya akan dibeli. Jadi, itu masukan dari saya yang pertama, Pak. Dia sudah akan merasakan pembayaran secara langsung memutuskan mata rantai yang terlalu panjang. Itu memang cita-cita saya sebagai ketua wanita tani agar terserap semua hasil pertanian.

Kemudian yang kedua, Pak. Di dalam perekrutan SPPI, ini terjadi di dapil saya di Bali. Perekrutan SPPI yang tidak transparan, Pak. Nama calon peserta yang secara tiba-tiba hilang setelah dinyatakan lulus tiba-tiba hilang, Pak. Nah, ini menurut saya kok tidak *anu* ya, Pak, tidak profesional sekali, Pak, ya, *sehingga* saya menilai bahwa *platform* pendata pendaftaran yang kurang informatif dan sering bermasalah sehingga pelaksana, pelaksanaan perekrutan SPPI yang sepenuhnya ini banyak diintervensi sehingga menghasilkan SPPI-SPPI yang seperti apa disampaikan oleh kawan-kawan kami. Banyak yang tidak berkualitas.

Saya lihat sendiri, Pak, SPPI-nya masih kecil-kecil. Nah, ini kan padahal saya waktu dari 6 Januari melihat kekurangan SPPI, saya langsung bantu, Pak, bantu semua sarjana-sarjana yang masih belum ada pekerjaan silakan langsung. Saya bantu turun langsung, Pak, dan saya lihat yang saya sudah pilih orang-orang yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, tetapi setelah mendaftar inilah yang terjadi, Pak, sudah dinyatakan lulus hilang selanjutnya. Saya bertanya ke mana, Pak? Ini yang terjadi, Pak, sehingga mohon dengan sangat hormat Pak, semua yang terjadi mempersulit di lapangan ini agar dirombak sehingga tidak dipergunakan lagi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk leluasa melakukan intervensi di lapangan.

Sekian, terima kasih.

Om Santi, Santi, Santi Om.

(PERGANTIAN KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Terima kasih, Bu Tutik.

Lanjut, Ibu Netty. Bersiap, Bu Eko.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si):

Terima kasih, Pimpinan atas kesempatan yang diberikan.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi menjelang siang, dan*

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya cintai, saya banggakan Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI, Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia beserta seluruh Jajaran.

Tentu saja, Pak Kepala, masukan teman-teman ini semua atas dasar cinta ya, bahwa program ini harus berjalan dengan baik ya. Kenapa? Karena sejak awal kita menangkap pesan yang sangat ideologis dari presiden bahwa setiap anak ketika berangkat bersekolah itu sudah sarapan, ya, dan tentu saja kalau kita bicara tentang dampak berikutnya, kita ingin kasus kurang gizi, gizi buruk ini bisa tertangani dengan Program Makan Bergizi Gratis dan dalam konteks jangka panjang kita juga berharap Program MBG ini akan menjadi investasi menyiapkan SDM Indonesia yang sehat, unggul, dan berdaya saing. Kita semua enggak bisa memungkiri itu Ibu/Bapak, ya, bahwa ini program yang baik, ya.

Hanya memang sebagai lembaga baru, kemudian juga program yang baru dalam perjalanannya berproses ya, dan kita di sini memberikan catatan kritis agar program ini menjadi lebih baik seperti itu. Nah, oleh karena itu, Pak, karena memang sudah sangat banyak catatan dari teman-teman, saya hanya ingin menambahkan beberapa poin saja terkait dengan temuan yang dilakukan oleh Center for Indonesia Strategic Development Initiative atau CISDI yang melakukan beberapa penelitian ke daerah-daerah yang sudah melaksanakan Program MBG ini, Pak.

Yang pertama, memang ternyata, Pak, standardisasi penyediaan MBG ini ternyata masih sangat beragam. Ditemukan oleh CISDI hanya 17% yang memenuhi standar ya, standar gizi dan juga keamanan pangan. Nah, oleh karena itu, memang kita harus bekerja keras tampaknya, Pak, ya. Nah, yang juga menjadi temuan CISDI adalah 45% menu yang disajikan itu adalah pangan ultra proses. Padahal justru kita ingin memberdayakan petani lokal, mengenalkan pangan lokal, olahannya dilakukan oleh ibu-ibu dan warga lokal begitu ya sehingga kasus-kasus yang tadi kita khawatirkan itu tidak terjadi. seperti itu.

Nah, oleh karena itu, CISD memberikan beberapa catatan, Pak, bahwa boleh jadi yang harus dilakukan adalah mengevaluasi apakah betul satu SPPG itu layak atau memadai jika harus melayani 3.000 sampai 3.500 ya penerima manfaat ini. Karena di beberapa negara sangat kurang, Pak, kurang, Pak, sangat jauh dari angka itu ya. Di Jepang misalnya hanya 500 orang seperti itu atau kalau di Brazil ada penerapan tidak boleh ya diberikan makanan ultra proses ya, buat anak-anak sekolah, seperti itu.

Nah, mungkin praktik baik ini, Pak, yang menurut saya perlu dijadikan catatan bagi Badan Gizi Nasional agar ke depannya kepercayaan masyarakat ini semakin tinggi, Pak, terhadap Program Makan Bergizi Gratis ya. Nah, oleh karena itu, saya sepakat bahwa kejadian-kejadian di berbagai tempat jadikan sebagai apa? Vitamin yang mungkin rasanya pahit, tapi akan membenahi ya

penyelenggaraan MBG ini, Pak. Karena ternyata kalau kita bicara tentang pemberian makan, *boro-boro* 3.000 sampai 3.500 orang, Pak. Kadang di rumah pun dalam skala yang kecil kalau aspek keamanan pangan itu dilanggar ya, boleh jadi serumah juga bisa diare, Pak, yang isinya cuma 6-8 orang begitu ya.

Nah, oleh karena itu, hari ini marilah sama-sama kita juga pastinya sepakat ya Ibu dan Bapak mendorong BGN untuk mampu melakukan *tracing* ya dari laporan-laporan yang terjadi. Tadi disebutkan ada di Bombana, Empat Lawang, Nunukan Selatan, Pandeglang. Saya juga ikut mencatat, Pak, dari berbagai media sosial, Semarang, Waingapu, Tasikmalaya, Sukoharjo, dan di dapil Jawa Barat juga ada, Pak, ya di Cianjur seperti itu. Nah, menurut saya ini lakukanlah *tracing*. *Tracing* ini mulai dari seperti apa bahan lokalnya, kemudian bagaimana penerimaannya, penyiapannya, pengolahannya sampai distribusinya. Itu yang pertama.

Yang kedua, Pak, seperti apa sih koordinasinya? Karena apa? Karena kalau kita bicara tentang standar gizi, keamanan pangan, kita punya dinas kesehatan, kita punya Balai Besar POM di daerah masing-masing. Nah, ini koordinasinya seperti apa, Pak, yang sudah dilakukan? Karena ini penting ya koordinasi ini. Yang juga tidak kalah penting, Pak, tata kelola komunikasi publiknya, Pak. Kenapa? Karena kita perlu bahwa masukan itu memiliki unsur validitas, Pak. Jadi, kalau kemudian dimungkinkan buatlah kanal aduan publik terhadap pelaksanaan MBG ini sehingga Bapak enggak mesti menerima dari, dari apa namanya dari media sosial, tapi dari masyarakat sebagai penerima manfaat ini bisa langsung masuk, Pak, resmi seperti itu yang menjadi *dashboard* bagi kita untuk melakukan evaluasi dan tentu saja kita ingin bahwa ketidakpercayaan masyarakat ini bisa kita tepis kalau kemudian kita melakukan *quick response* ya terhadap kasus-kasus ini.

Dan terakhir, Pak, menurut saya yang juga tidak kalah penting ya, setiap kasus ini, tentu saja kita ingin dikelola dengan baik ya, tidak seperti apa namanya pemadam kebakaran begitu, Pak. Dari awal kita sudah bisa membayangkan apa saja yang harus diperbaiki dan terakhir, kita juga ingin bertanya, Pak, perhatian apa yang sudah diberikan oleh BGN terhadap kasus-kasus atau korban dari kejadian di berbagai daerah ini? Karena bagi saya ini akan sangat empati ya, buat masyarakat jika BGN betul-betul memberikan perhatian kemudian atensi bagi kasus-kasus yang terjadi di daerah.

Itu saja mungkin Pimpinan yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih.

*Billahi tawfik wal hidayah,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Walaikumsalam.

Terima kasih Bu Netty.

Lanjut, Ibu Eko Kurnia Ningsih. Bersiap, Pak Asep.

F-PDI PERJUANGAN (EKO KURNIA NINGSIH):

Terima kasih.

**Pimpinan beserta Teman-teman sekalian yang saya sayangi dan saya cintai,
Kepala Badan Gizi beserta Jajarannya yang saya hormati.**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Dari paparan tadi, bisa kita lihat secara jelas data kuantitatif kelompok penerima, total penerima manfaat, bahkan total keracunan di Indonesia sebagai bahan evaluasi, Pak. Namun, bagaimana dengan evaluasi mengenai indikator gizi yang digunakan? Bagaimana status awal gizi siswa atau target perbaikan gizinya seperti apa? Dengan begitu, kita bisa tahu bahwa program ini memang sesuai dan berjalan dengan tujuan dari Bapak Presiden kita sebagai bagian dari strategi besar pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) Indonesia yang unggul dan sehat untuk mengatasi *stunting* dan gizi buruk.

Bapak Kepala Badan Gizi.

Mohon penjelasannya dalam program yang sudah berjalan sejauh ini. Apakah sudah ada indikasi bahwa program ini sesuai dengan tujuan yang sebenarnya? Itu pertanyaan saya yang pertama, Pak.

Yang kedua, sehubungan dengan Program MBG yang berjalan di dapil saya di Provinsi Bengkulu, Pak, hingga triwulan kedua tahun 2025 ini penerapan MBG masih terpusat di Kota Bengkulu. Nah, ini belum sampai ke kabupaten-kabupaten, Pak, baru dipusatkan di kota. Ini ada 6 titik SPPG-nya dan rencananya ada tiga titik lagi di tahun ini. Nah, saya minta realisasinya sampai di kabupaten, Pak, karena belum terjangkau ke daerah yang rentan. Ini yang kita inginkan seperti wilayah yang tingkat *stunting*-nya tinggi dan gizi buruknya yang belum teratasi. Dalam hal ini pemda provinsi sudah mengusulkan perluasan ke-20 titik sekolah.

Namun, belum semua disetujui oleh MBG yang ada di pusat dengan alasan perlu sinkronisasi data dan kesiapan teknik. Di sini mohon penjelasan lebih lanjut terkait hal tersebut. Bagaimana evaluasi sasaran prioritas penerima manfaat MBG ini. Jangan sampai, Pak, menimbulkan asumsi dari masyarakat bahwa pemilihan sekolah atau kebutuhan sasaran MBG cenderung mengikuti kesiapan infrastruktur perkotaan saja, bukan karena kebutuhan gizi. Karena di sini kita yang kita perlukan adalah memberikan gizi untuk daerah-daerah yang rentan kekurangan gizi dan juga *stunting*-nya.

Demikian, Pak.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thoriq,
Billahi taufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Waalaikumsalam.

Terima kasih, Bu Eko.

Lanjut, Pak Asep. Bersiap, Pak Ade Rizki. Pak Asep ada? Oh, keluar ya?

Silakan, Pak Ade Rizki.

F-P. GERINDRA (ADE REZKI PRATAMA, S.E., M.M.):

Terima kasih, Ibu Ketua.

**Pimpinan, dan Bapak/Ibu Anggota Komisi IX yang kami hormati,
Kepala Badan Gizi Nasional,
Bapak-bapak Deputi, dan
Bapak/Ibu Direktur dan seluruh Jajaran Badan Gizi Nasional yang hadir pada hari ini.**

Saya kira, pada hari ini begitu banyak masukan-masukan dari teman-teman Anggota Komisi IX. Saya kira, ini adalah bentuk rasa sayang Komisi IX terhadap Badan Gizi Nasional pada hari ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya bahwasanya kita sama-sama tahu bahwa Badan Gizi Nasional ini belum lama, baru tahun lalu dan pada akhirnya Januari minggu pertama itu baru memulai dengan niat yang ini adalah bukanlah hanya bagian daripada Program Prioritas Presiden pada hari ini, tetapi menjadi salah satu program utama, Pak. Nah, hingga pada akhirnya program ini banyak mendapatkan apresiasi. Tidak hanya apresiasi di dalam negeri, tetapi begitu banyak apresiasi di luar negeri dan bahwa setiap kunjungan presiden ke luar negeri itu mendapatkan apresiasi dan bahkan banyak

yang merespons ini secara positif dan siap juga untuk membantu negara kita dalam pelaksanaan suksesnya Program Makan Bergizi Gratis.

Kemudian, Pak Prof, kami kira pada hari ini terkait dengan serapan anggaran ini adalah triwulan pertama dengan segala tantangan dan kendala, pada hari ini, ini menjadi, kalau di atas kertas ya, ini kalau kita coba *breakdown* dengan jenis belanja, kami kira, masih banyak yang jauh dari harapan, tetapi tidak apa-apa. Kami yakin dan percaya, Pak, karena kita memaklumi ini adalah sebuah program baru, tetapi nanti kami harap nanti di triwulan kedua dan sampai seterusnya ini harus digenjot, Pak. Jangan sampai nanti serapan ini, kita berlarut-larut pada akhirnya tidak tercapai.

Pada hari ini lembaga dan kementerian berlari melakukan *approach* lobi-lobi ke Kementerian Keuangan untuk mencari pagu, pagu anggaran, tetapi pada hari ini Badan Gizi Nasional karena ini adalah bagian daripada program utamanya Presiden Republik Indonesia pada hari ini diberikan pagu yang besar dan akhirnya juga akan bertambah nanti di semester kedua dan waktu-waktu selanjutnya. Oleh karena itu, di saat lembaga dan kementerian lain berupaya ini mengejar-ngejar untuk mencari pagu, nah pada hari ini dan kita BGN dengan pagu yang cukup besar pada hari ini diharapkan mampu dengan realisasi yang maksimal.

Kemudian terkait dengan penyerapan anggaran. Potensi penyerapan anggaran di halaman 14. Di bulan Juni, ini ada proyeksi sampai di akhir tahun, tahun anggaran 2025. Kalau kita melihat *breakdown*-nya proyeksi di bulan Juni SPPG dengan jumlah 1.958 penyerapan anggaran 4,7. 4,7 ya? Nah, ini kurang lebih 2,3, Pak, kalau dirata-ratakan. Nah, saya coba *breakdown* di bulan Juli itu 8,1. Di Agustus jadi 4, di September 3,6, Oktober 2,7, November 2,9, dan Desember 3,8.

Pak Kepala, saya kira ini coba kembali di-*breakdown* lebih lanjut hingga pada akhirnya data ini akurat ya. Walaupun ini hanya sekadar proyeksi, tetapi tentu akurasi dari proyeksi ini juga tidak hanya disampaikan kepada kami di Komisi IX DPR RI, tetapi kan Bapak dan Deputi juga dalam waktu-waktu tertentu akan memaparkan presentasi ini dalam rapat-rapat terbatas dengan, dengan presiden. Jangan sampai nanti angka-angka ini melenceng, Pak. Jangan sampai nanti angka-angka ini hanya sekadar di atas lembaran putih, tetapi ini juga harus dipertanggungjawabkan dan beberapa hal yang lain terkait dengan *problem* yang terjadi makanan, distribusi, waktu. Kami kira sudah sewaktunya, Pak, ini semacam dibentuknya semacam aturan tidak hanya aturan pada saat proses memasak, proses distribusi, pembelian bahan baku, tetapi juga proses atau aturan pada saat konsumsi agar nanti segala sesuatunya itu sesuai dengan peruntukannya, Pak. Nah, kami kira ini menjadi catatan penting, Pak, bagi kita semuanya.

Kemudian saya ingin bertanya, Pak, sudah, sudah ada atau belum, Pak, pada hari ini mengenai regulasi tentang tata kelola makan bergizi gratis yang *level*-nya sudah setingkat perpres atau inpres, perpres lah minimal begitu. Nah, itu ya.

Ini agar nanti memudahkan Program Makan Bergizi Gratis juga yang dilakukan oleh BGN.

Saya kira itu, Pak Kepala Badan. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini program ini semakin cepat terserap dan semakin banyak dirasakan manfaatnya bagi seluruh anak-anak yang ada di negara kita.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Waalaikumsalam.

Terima kasih, Pak Ade.

Saya kembalikan ke Pak Asep Romy.

Selanjutnya, bersiap Ibu Hj. Mariana. Tolong diperhatikan waktu ya Bapak/Ibu ya. Di *monitor* sudah dimunculkan kesempatan waktunya.

F-PKB (H. ASEP ROMY ROMAYA):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan Teman-teman Komisi IX yang saya cintai, tidak lupa Kepala Badan, Deputi, para Direktorat, dan Jajaran BGN yang saya hormati.

Dalam hal ini, setelah saya mendengarkan evaluasi tadi yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala, di dalam suatu pekerjaan itu ada perencanaan yang tadi saya sampaikan. Tadi saya menyimak rencana ke depan dan target yang diperlukan itu melalui tahapan-tahapan yang tadi disampaikan terutama terkait evaluasi tadi. Dari temuan saya itu, yang tadi Pak Heru disampaikan itu, kalau itu dijalankan itu sangat luar biasa. Seperti Bapak yang akan ditargetkan dari bulan ke bulan, dari triwulan itu sepertinya bisa percepatan. Jangan sampai di lapangan antara ada Danramil, kepala daerah, distrik, terus kependudukan, terus dinas kesehatan mereka siap sebetulnya kalau bersama-sama. Apalagi saya sebagai mitra di BGN, itu saya sangat *support* sekali. Saya harus sangat mengawal program Pak Presiden ini, Pak.

Itu percepatan bisa secepatnya ketika mana yang harus di, didahulukan. Contoh ke daerah, ke pelosok itu yang harus diperlukan, diutamakan dulu misalkannya jangan sampai yang harus didahulukan terbengkalai. Contoh, kan di

sana di terutama di dapil saya Dapil Jabar II itu banyak banget perumahan ternyata itu sudah duluan, tapi yang pelosok masih terealisasi bahkan ada yang suatu ada, ada bangunan. Ini sudah ada pendataan. Nah, kan itu simpang siur. Ketika kita dikumpulkan dari tiap-tiap instansi itu sangat akan percepatannya, pemetaannya. Terus apalagi tadi misalkan antara harus ada jarak 6 kilometer dari titik koordinat dapur ke dapur yang lain. Sedangkan di daerah saya itu ada variasi, ada yang penduduknya padat, ya itu bisa lebih dari satu kecamatan saja bisa tiga SPPG atau dapur. Itu bagaimana caranya? Apakah harus mengikuti aturan per 6 kilometer atau seperti apa?

Sekali lagi, saya siap mendorong menyukseskan program Pak Presiden ini. Saya bukan apa-apa mengkritik seperti ini, saya berkewajiban untuk suksesnya program ini dan menjaga nama baik Pak Presiden, BGN, dan saya juga untuk suksesnya makan gizi gratis ini. Sekali lagi, saya siap harus seperti apa untuk cari solusi, solusi yang harus kita dilaksanakan.

Mungkin Pimpinan, saya cukupkan sekian.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thoriq,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Walaikumsalam,

Terima kasih, Pak Asep.

Silakan, Ibu Mariana.

F-P. GERINDRA (Hj. MARIANA, SAB.,M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan beserta Pimpinan Komisi IX beserta seluruh Anggota,

Yang saya hormati Pak Dadan beserta seluruh Jajaran.

Mungkin singkat saja Pimpinan. Pak, kemarin saya ada turun ke beberapa sekolah di dapil saya Kalimantan Selatan. Pak, itu apa benar kalau setiap hari Jumat mereka dapat makannya cuma mi atau bihun dan satu kotak susu, Pak? Kemarin saya ada mengobrol dengan kepala sekolah, mereka bilanganya begitu sama saya dan juga di Kalimantan Selatan ini kan ada di sini saya baca jumlah SPPG-nya 13 dan tambahan 14 Mei itu 3 ya, Pak, ya? Pak, Itu saya minta tolong datanya, Pak, detail lengkapnya SPPG-nya ini di mana saja. Dan juga kemarin

saya ada turun ke satu kelurahan, itu SD-nya itu, Pak, sampai sekarang cuma Kelurahan Pengurus Dalam itu baru dapat dua SD, Pak. Jadi, Pemurus Dalam 1 dan Pemurus Dalam 8. Padahal di situ, Pak, jaraknya berdekatan ada 2 SD, Pemurus Dalam 2 dan 3. Itu apa dekat sekali jaraknya, tapi mereka dilewati. Kemarin kepala sekolahnya lapor ke saya, mereka juga ibaratnya minta agar SD tersebut bisa dapat juga, Pak. Karena di tempat saya itu di Pemurus Dalam itu memang ekonominya menengah ke bawah, Pak.

Mungkin itu saja Pimpinan yang saya sampaikan. Tolong diperhatikan, Pak. Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Walaikumsalam.

Terima kasih, Bu Mariana.

Sebelum saya lanjutkan ke Ibu Sri Meliana, izin saya memperpanjang waktu terlebih dahulu, karena tadi kesepakatan kita sampai dengan jam 12.00. Ini di meja saya masih ada empat penanya lagi. Tiga ya, tiga penanya lagi. Jadi, saya izin perpanjang sampai dengan jam 12.30 Bapak/Ibu ya? Boleh ya? Baik.

(RAPAT: SETUJU)

Baik, silakan, Bu Sri Meliyana. Bersiap, Ibu Arzeti.

F-P. GERINDRA (Ir. SRI MELIYANA):

Terima kasih, Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IX yang saya sayangi dan banggakan, BGN seluruh yang hadir hari ini, mitra kami yang kami sandarkan semua harapan, Pak, untuk permasalahan suksesnya MBG kita ini, Pak.

Kalau tadi sudah disampaikan oleh banyak anggota tentang segala sesuatu, maka itu memang benar-benar keinginan kita untuk menjadikan program kita ini lebih baik. Kalau masalah yang sulit-sulit sudah kita lalui, Pak, tapi berita gembiranya kalau dari dapil saya sejak ada BGN ini anak-anak rajin sekolah, Pak. Rajin sekolah karena akan ada makan siang dan kalau di daerah, Pak, menu makan itu sudah luar biasa, Pak. Kami di daerah-daerah sulit mendapatkan ayam, mendapatkan daging itu pada situasi tertentu, tapi setiap hari mereka sekolah, mereka diberikan makanan yang seperti yang mereka cita-citakan sebagai anak

sekolah, Pak. Kemudian selain itu, kalau menurut saya dengan membiasakan anak-anak sekolah itu makan yang benar, maka kita juga mengajarkan kepada mereka untuk pola makan yang benar dan kemudian kita bisa menghindari obesitas atau diabetes dan lain-lain yang semakin mengancam anak-anak.

Nah, dari seluruh paparan tadi Bapak sudah dengar bagaimana pentingnya banyak pengawasan dan lain-lain, tapi menurut saya, Pak, yang paling penting itu adalah regulasi. Saya ingin tanyakan kepada Bapak, sudah sekuat apa regulasi yang kita miliki, Pak? Kalau menurut catatan kami, regulasi baru sebatas Keputusan Deputy Bidang Penyaluran BGN. Padahal, Pak, kalau kita lihat Program Pengentasan *Stunting*, Pak, itu aturannya undang-undang. Sebatas kalau kita, kalau kita *compare*, Pak, ya, dia memiliki payung hukum yang lebih kuat, kerangka regulasinya setingkat peraturan presiden dan didukung peraturan setingkat menteri dan petunjuk teknis sebagai acuan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan menerapkan program. Jadi, kalau sekarang Bapak-bapak sudah punya regulasi sebatas apa, Pak? Dan ini harus tetap terus ditingkatkan. Semakin *rigid* regulasinya, maka semakin teratur jalannya, Pak, dan itu akan mempermudah kita, mempermudah evaluasi, mempermudah pengawasan, dan mempermudah segala bentuk membereskan segala urusan yang berhubungan dengan program kita ini.

Kalau tadi Ibu Netty merujuk ke CISDI ya? Nah, maka menurut CISDI, Pak, mereka melakukan komparasi juga tata kelola Program *Free School Meals* di India, Brazil, dan Jepang yang menjadi rujukan kita pasti. Itu sudah di tiga negara itu regulasinya sudah undang-undang. Jadi, mohon Bapak-bapak bersegera memperkuat program kita ini dengan regulasi. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, pengawasan, Pak. Saya setuju sama Bu Irma tadi, jangan sampai yang mengawasi ini *social media*, Pak. Kalau *social media* dia tahu dulu baru kita respons. Kita selalu ketinggalan selangkah. Sudah *viral* seolah-olah kalau enggak *viral* tidak kita, tidak kita selesaikan. Padahal saya yakin BGN tidak begitu, maka kita perlu menyediakan kanal, Pak. Kanal aduan yang langsung ke BGN dan langsung direspons. Jadi, BGN tahu lebih dulu tentang kejadian-kejadian ini dari kanal yang kita sediakan secara legal.

Mungkin kita akan sibuk karena hal itu, tapi itu penting. Lebih baik kita tahu duluan daripada media sosial duluan memberitakannya, membumbuinya pula, Pak, dengan banyak, dengan banyak kejadian sampingan. Nah, itu dua harapan saya, Pak. Kita punya regulasi yang kuat, kita punya kanal pengaduan yang bisa membuat kita respons cepat terhadap segala suatu yang akan terjadi. Tadi Bapak sendiri bilang ada respons, ada kejadian karena kita belum tahu, ada kejadian ketika kita jenuh, ada kejadian 10 tahun setelah suatu program berjalan, maka yang disebut kejadian ini memang dinamikanya, Pak. Tidak bisa kita elakkan. Yang kita bisa lakukan menerima laporannya dan kemudian menyelesaikannya pada prosedur yang cepat dan tidak membuat trauma di masyarakat. Masalah-masalah kejadian yang berulang dan tadi kawan-kawan juga sudah menyarankan

betapa perlunya kita membuat kolaborasi, sinergitas atau segala sesuatu dengan pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah dapat, dapat menolong kita, Pak, mengawasi kejadian-kejadian di setiap daerah.

Demikian Ketua yang ingin kami sampaikan. Selamat bekerja Bapak-bapak. Selamat menyempurnakan segala sesuatu sehingga program ini mendapatkan *output* dan *outcome* sesuai dengan yang kita harapkan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Waalaikumsalam.

Dipersilakan, Ibu Arzeti. Bersiap, Bu Delia.

F-PKB (Dr. ARZETI BILBINA SETYAWAN, S.E. M.A.P.):

Terima kasih, Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Yang sangat saya hormati Ketua Komisi, dan juga Sahabat-sahabat Anggota Komisi IX, Prof. selaku Kepala Badan Gizi Nasional beserta Jajaran.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya hanya ingin menambahkan saja dari pendalaman yang dilakukan oleh Sahabat-sahabat Anggota Komisi IX dan di sini kita bersama-sama mengevaluasi kinerja yang sudah dilakukan oleh BGN selama 6 bulan ke belakang. Tentunya apresiasi yang tinggi yang kami bahasakan di dalam ruangan ini karena kalau kita bicara mengenai jangka waktu yang baru berjalan sangat sempit, boleh dikatakan 6 bulan, walaupun di luar sana mungkin banyak sekali pemberitaan, tetapi kita fokus di sini.

Kami sebagai mitra dari BGN yang ikut menjadi bagian dalam pengawasan dan turun ke lapangan langsung bahwa kami melihat ada rasa semangat baru. Kalau tadi Ayu Meli mengatakan anak-anak semangat sekolah, tetapi kita juga bisa melihat bahwa petani, pelaku UMKM dan komunitas, dapur komunitas mereka punya satu *hope* bahwa pemutus mata rantai ekonomi di daerah ini ternyata dengan adanya BGN membuat mereka itu merasa bahwa akan berjalan lebih baik ini untuk peningkatan ekonomi terutama untuk di daerah dan juga dahil saya.

Dan saya mengapresiasi sekali untuk semangat yang diberikan kepada keluarga saya khususnya dapil saya Surabaya-Sidoarjo dengan program dari BGN ini, dan kami juga mengapresiasi dengan baik kinerja cepat yang terus dilakukan, pembenahan-pembenahan yang terus dibuat oleh Badan Gizi Nasional untuk bisa menyamakan persepsi antara masyarakat dan juga program pemerintah dalam membuat mata rantai untuk menciptakan generasi emas di 2045 yang notabenenya ini sinerginya adalah pemutus rantai dengan *stunting*.

Saya setuju ketika Ayuk Meli mengatakan, ayo kita koordinasi, tapi jangan sampai koordinasi ini justru membuat BGN itu di bawah dari kementerian atau lembaga lain. Kami mendukung BGN untuk memiliki payung hukum kuat selaku kepala koordinasi untuk penciptaan gizi yang baik kepada masyarakat khususnya kepada anak-anak kita ke depannya. Jangan sampai tumpang tindih antara Kemensos, Kemendagri atau BKKBN. Jadi, kami berharap di sini, mari kita dukung DPR khususnya untuk BGN agar menjadi pusat penting untuk koordinasi, penyusunan, dan juga pencakupan untuk gizi baik bagi masyarakat kita. Hanya itu mungkin yang ingin saya sampaikan.

Sekali lagi, saya mengapresiasi kinerja cepat, pembenahan-pembenahan kesempurnaan untuk semua program yang dibuat ke depannya dan ada satu *habbit* baik ketika tadi Pak Heru mengatakan “Isi Piringku” ada protein, ada karbohidrat, ada sayur, dan juga ada buah, tapi ada satu *habbit* lain di mana mereka ada jam makan siang di mana anak-anak bersama-sama mengkonsumsi makanan baik itu yang diberikan kepada mereka dan *habbit*-nya mereka tidak pegang *handphone*. Biasanya kan sekarang anak-anak tuh senang *banget* makan sambil pegang *handphone*. Ini tidak ada. Jadi, ini akan dibawa ketika mereka kembali ke rumah.

Sekali lagi, kami mengapresiasi kinerja-kinerja cepat yang dilakukan oleh BGN. Terima kasih.

*Ihdinas siratal mustaqim,
Wallahul muwaffiq ila aqwamith thoriq,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Waalaikumsalam.

Silakan, Ibu Delia.

F-P. GOLKAR (DELIA PRATIWI SITEPU, S.H.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Kepala Badan Gizi Nasional, dan
Yang saya sayangi Teman-teman Komisi.**

Baik, tadi di halaman 5 saya ada melihat perbaikan mekanisme pencairan uang. Nah, timbul pertanyaan saya kalau seandainya ada proses pendanaan melalui *virtual account* mengalami kendala, apakah bisa melakukan proses pencairan dengan metode manual? Karena yang saya khawatirkan kegiatan dapur gizi mengalami kendala dari proses pencairan yang akhirnya mengganggu dan tidak ada alternatif pendukung lainnya. Yang kedua, bagaimana strategi pengendalian anggaran agar tidak terjadi pemborosan terutama pada biaya nonpangan, seperti distribusi, logistik, dan honor SDM? Yang ketiga, dari hasil pemetaan berapa banyak sekolah di daerah 3T yang belum memiliki fasilitas dapur atau akses ke penyedia makanan yang memadai.

Yang selanjutnya apa? Apakah ada insentif atau dukungan yang diberikan kepada pemerintah daerah agar mereka aktif terlibat dan siap secara logistik dalam kelembagaan agar tidak terjadi pemborosan SDM pengelola. Selanjutnya, indikator apa yang digunakan pemerintah untuk mengevaluasi keberhasilan MBG tidak hanya dari jumlah distribusi, tetapi juga dari aspek peningkatan gizi dan kehadiran siswa. Makan gizi gratis lahir dari niat baik pemerintah yang salah satu alasan utamanya adalah untuk menekan angka *stunting*. Dalam proses makan gratis ini, pencapaian target penerima pada ibu hamil dan ibu menyusui sangatlah rendah. Padahal itu adalah masa emas orang tua dalam memberikan gizi baik pada anak semenjak di kandungan atau sedang menyusui dan faktor utama sebagai pencegahan *stunting*. Saya menghimbau pencapaian penerima makan gratis ini, tidak mengesampingkan pada penerima manfaat ibu hamil dan menyusui.

Mungkin itu saja, Pimpinan. Terima kasih.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Walaikumsalam.

Terima kasih, Bu Delia.

Terakhir ini dari anggota, saya persilakan Bapak Sahidin dari Fraksi PAN.

F-PAN (Ir. H. SAHIDIN):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan serta Anggota Komisi IX yang kami hormati, juga Pak Kepala Badan yang kami hormati beserta Jajaran.

Tadi telah banyak sekali, Pak, masukan ya, yang disampaikan oleh teman-teman semua. Kami juga ingin juga memberikan masukan ya juga aspirasi yang datang pada kami. Program MBG ini adalah program strategis presiden. Ini mulai dikampanye, Pak, sampai hari ini ya, dan ini semua anak-anak se-Indonesia sudah tahu semua, Pak. TK pun sudah tahu, tapi sayang mereka yang di desa belum pernah menikmati. Sementara dia anak bangsa yang sama setara semuanya.

Kalau kita lihat dari program Bapak ini dari bulan ke bulan saya khawatir, Pak, ini tidak sampai ya program ini ke desa, karena kita mulai di kota semuanya. Sementara di kota ini, anak-anak yang sekolah hampir semuanya sudah sarapan, sudah makan pagi semuanya. Kenapa? Ekonominya bagus, infrastrukturnya bagus, hampir semuanya bagus, sekolah juga bagus. Sementara kalau di desa, Pak, infrastrukturnya sangat miskin, transportasi kurang, sekolah jauh, semua miskinlah. Nah, ini seperti apa kita, Pak, menyikapi supaya ini keadilan ini bisa dirasakan kesetaraannya sama anak-anak ya.

Kami saran, Pak, saran. Ya sebelum sampai ke desa, anak-anak ini kita berikan uang tunai, Pak, untuk jajan. Supaya apa? Supaya merasakan program nasional ini, sembari Bapak mempersiapkan infrastrukturnya untuk mempersiapkan PMBG ini sampai ke desa, tetapi sebelum sampai situ, ya kita adikan untuk memberikan anak-anak ini jajan. Apakah 15.000 satu paket itu kita berikan 15.000 jajannya sampai program ini bisa masuk ke desa.

Mungkin itu, Pak, masukan kami. Terima kasih, kami sudahi.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Terima kasih.

Pak Sahidin ini baru di Komisi IX Bapak/Ibu semua. Rotasi dari Fraksi PAN ya, sebelumnya di Komisi II. Supaya tercatat, Pak, nanti supaya ikut mendukung Program BGN di dapil Bapak dari Riau ya.

Baik, terima kasih Bapak/Ibu Anggota sudah menyampaikan semuanya.

Selanjutnya saya persilakan dari meja pimpinan, Pak Yahya ada yang mau ditambahkan?

F-P. GOLKAR (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan yang saya hormati,
Para Anggota, Pak Kaban, Pak Wakil Kaban, dan para Deputi, serta Sestama.**

Pertama-tama, saya ingin memberikan apresiasi kepada BGN atas capaian yang sudah dilakukan. Di mana dalam waktu 4 bulan sudah bisa mendirikan 1.286 SPPG dan cakupan penerima manfaatnya 3.500 sekian. Yang ingin sampaikan. Pertama, kita masih ingat ketika pertama kali Pak Kepala Badan menyampaikan presentasi di ruangan ini, dulu ada rencana bahwa rencananya bukan ada rencana, rencananya akan membangun 5.000 SPPG atau dapur di mana terbelah menjadi dua. Satu, dibangun sendiri oleh BGN sebanyak 1.500 sekian dan 3.500 dibangun oleh pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini ada TNI, Polri, ada swasta, ada yayasan. Nah, saya tanyakan sejauh mana komitmen ini, Pak, dilaksanakan? Antara lain misalnya kapan BGN akan melakukan pembangunan sendiri 1.500 itu? kapan mulai. Saya kira, kita perlu mendapatkan informasi untuk melakukan percepatan.

Yang kedua, apakah pola sewa dengan pihak ketiga itu masih relevan ketika muncul di tengah masyarakat yayasan yang begitu gencar melakukan kerja sama, tetapi catatannya banyak juga yayasan yang tidak melakukan sendiri SPPG. Jadi, mereka melakukan kerja sama dengan pihak *catering* itu yang banyak ya. Jadi, seperti yang muncul di Kalibata itu memang pola yang banyak di lapangan seperti itu yang kami ketahui. Nah, kalau yayasan itu memang pola yang ideal, ini apakah ini akan diteruskan atau memang atau dibatasi atau memang idealnya memang yayasan? Ya kan, dengan tidak menutup kemungkinan kerja sama dengan pihak ketiga yang dibangun oleh pihak ketiga yang disewa oleh BGN. Jadi, ini menurut saya, skema-skema ini harus dilakukan untuk melakukan percepatan, karena pola yayasan pergerakannya juga lumayan cepat, tetapi bentuk-bentuk pengawasannya yang perlu ditingkatkan, yang pertama.

Yang kedua, saya ingin menanyakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BGN terhadap SPPG itu dan yayasan seperti apa? Tolong dijelaskan, Pak. Karena di dalam paparan Bapak tidak disebutkan ya kan bagaimana pola atau skema pengawasan yang dilakukan sampai ke tingkat bawah. Tolong kami berikan penjelasan ini siapa saja yang terlibat? Apakah ada pihak ketiga yang dilibatkan misalnya pemda, tentara, polisi misalnya atau Badan POM ya kan. Ini kita tidak mendapatkan gambaran di sini belum disampaikan oleh Pak Ketua.

Yang ke, yang ketiga, saya melihat paparan yang di halaman 4, Pak, tentang realisasi atau rencana tambahan SPPG pada bulan Mei ini sebaiknya mencantumkan juga kalau laporan ke kami itu kabupatennya, kabupaten/kotanya, Pak, di sini belum ada. Dulu ada pernah disampaikan pertemuan sebelum ini, tapi

sekarang tidak ada. Nah, kalau bisa nanti secara tertulis tolong disampaikan untuk memudahkan para Anggota Komisi IX ikut melakukan pengawasan di lapangan.

Yang keempat, mengenai realisasi anggaran. Sama-sama kita ketahui bahwa realisasi anggaran sampai bulan Mei, awal Mei ini sebanyak 3,36%, yaitu senilai sekitar 2,3 triliun. Nah, kalau kita ingin mencapai 71 triliun pada akhir Desember nanti, kira-kira strateginya seperti apa, Pak? Iya kan? Karena 4 bulan baru mencapai 3,6%. Jadi, kami perlu mendapatkan penjelasan mengenai strategi untuk menyampaikan untuk mendapatkan angka 71% itu seperti apa? Apakah dana dari penghematan yang 100 triliun itu akan dikasih pada bulan apa tahun ini atau tahun depan? Ya mestinya tahun ini mestinya kan, Pak, ya? Apakah sudah ada komitmen dari Menteri Keuangan?

Yang, yang keempat pola banper, Pak. Pola banper ini dilakukan karena BGN belum diberikan kewenangan. Betul Pak, ya? Untuk mengelola keuangan sendiri. Jadi, dari Menteri Keuangan langsung ke yayasan ya kan? Jadi, nah kapan ini pola banper di akhir sehingga yang mengelola seutuhnya adalah BGN. Apakah ini sudah ada regulasi yang memayungi, misalnya apakah perpres, inpres ya kan dan sebagainya.

Yang terakhir, ini saya sama dengan yang ditanyakan Delia tadi, Pak, Ibu Delia. Cakupan untuk ibu hamil, menyusui, dan balita ini masih kecil, Pak. Padahal jumlah kelahiran setiap tahun itu 5 juta, 5 juta setiap tahun. Itu data dari BKKBN. Apakah data ini juga menjadi pertimbangan dari BGN untuk meningkatkan cakupan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita? Karena ini dalam kategori pencegahan *stunting* sangat strategis, Pak, karena termasuk dalam kerangka 1.000 hari pertama kehidupan. Ya kan? Ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ini masuk dalam skema 1.000 hari pertama kehidupan.

Yang terakhir, Pak, saya dapat laporan dari beberapa orang di daerah. Ada oknum-oknum tertentu yang meminta jatah, Pak. Dari 15.000 minta 100.000. Itu *kan* besar itu, Pak. Itu kami temukan, Pak, di lapangan saya. Kami tidak akan menyebutkan oknum dari mana, pasti Bapak sudah tahu itu, tapi ini menurut saya perlu ditertibkan, Pak, karena membebani yayasan. 1.000, Pak, ya? Katakanlah 1.000 kali 3.000 kali 24 hari kan satu bulan itu bisa mencapai 80 juta, Pak. Jadi, cukup besar, Pak. Jadi, menurut saya perlu ditertibkan supaya tidak membebani yayasan yang mengelola dapur atau SPPG. Saya kira dari saya itu Bu Putih.

Terima kasih.

*Billahi taufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Waalaikumsalam.

Terima kasih, Pak Yahya.

Lanjut Pak Charles, silakan.

F-PDI PERJUANGAN (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Terima kasih, Bu Ketua.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IX,
Pak Kepala Badan beserta Jajaran.**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Bapak/Ibu.

Saya rasa kita pada kesempatan hari ini hadir di sini semuanya sepakat bahwa hari ini adalah rapat evaluasi dengan tujuan untuk bisa memperbaiki kinerja BGN ke depan. Karena pastinya setiap kita punya harapan yang sama untuk melihat bahwa programnya Bapak Presiden ini harus berhasil ya sehingga tadi banyak sekali Pak Kepala, teman-teman yang sudah memberikan masukan kritik konstruktif terhadap apa yang sudah dilakukan oleh BGN hari ini.

Saya ingin memulai dengan anggaran, Pak, ya. Tadi sudah banyak sekali yang menyampaikan catatan kritis terkait anggaran yang per hari ini baru terserap 3,36%. Sama seperti Pak Yahya tadi, saya ingin Bapak menjelaskan bagaimana dalam 7 bulan ke depan, Bapak bisa menghabiskan atau menyerap sisa 96% yang tersisa, Pak. Karena ini kan tidak mudah. Kalau sekilas sepertinya kok kayak bangun Candi Prambanan, Pak, dalam satu malam harus selesai ya. Karena saat ini, Pak, kementerian dan lembaga lain yang terkena efisiensi masih banyak yang sangat membutuhkan anggaran, Pak, banyak yang membutuhkan anggaran.

Misalkan di kesehatan ada pembelian vaksin yang dikurangi, di Kementerian P2MI anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk melindungi pekerja migran kita di luar negeri, di BKKBN anggarannya dipotong bisa untuk mengurangi angka *stunting*. Nah, saya ingin men-*challenge* Bapak bagaimana 7 bulan ini Bapak bisa menyerap 96%. Kalau misalkan secara realistis sepertinya tidak bisa terserap, saya berharap Bapak juga bisa berbicara jujur kepada Kementerian Keuangan sehingga yang realistis saja yang dipaparkan, yang diberikan sehingga anggaran sisa ini bisa diberikan didistribusi ke kementerian-kementerian lain yang hari ini banyak terpotong sehingga pelayanan publik tidak terganggu, Pak, di sektor-sektor lainnya begitu. Itu yang pertama.

Yang kedua, terkait dengan SPPG yang sudah ada saat ini. Sudah ada 1.286. Saya ingin Bapak memetakan saat ini 1.286 ini ada di mana saja. Karena yang kita inginkan adalah adanya pemerataan, Pak. Program MBG ini didirikan atau dicanangkan untuk bisa salah satunya ya memberantas gizi buruk, mengentaskan gizi buruk sehingga saya ingin melihat bahwa pemerataan SPPG ini ada di wilayah-wilayah di mana ya banyak kasus-kasus gizi buruk ya. Tidak terpusat di perkotaan saja, tidak terpusat di tempat-tempat yang memang infrastrukturnya sudah siap, tetapi fokuslah di daerah-daerah yang rentan terhadap kondisi gizi buruk di tengah masyarakatnya, begitu.

Selanjutnya terkait dengan insiden keracunan, Pak. Tadi Bapak sudah memaparkan beberapa lokasi ya yang memang dilaporkan kepada kita, mungkin juga dilaporkan kepada presiden, tetapi menurut catatan saya yang kami ambil dari beberapa pemberitaan di media-media *mainstream*, Pak. Media-media yang terdaftar di Dewan Pers begitu sehingga ini bukan berita *hoax* yang beredar di sosial media, ada kasus yang belum Bapak laporkan. Contoh di Bombana ya, di mana ada 13 siswa di SDN Kasipute muntah-muntah, sakit perut, dan lain sebagainya. Di Cianjur juga terjadi dengan 78 siswa, di Pandeglang ada 40 siswa juga terkena dampak keracunan, di SDN Alaswangi, Nunukan Selatan, di NTT ada empat kejadian, dan lain-lain, dan lain-lain. Ya, saya ingin BGN ini secara serius melakukan *tracing*, Pak, dan harus jujur, terbuka saja. Terbuka dan mau jujur di mana saja terjadi kasus keracunan. Jangan ada yang ditutupi dan *tracing* harus dilakukan dengan ketat.

Saya sangat sepakat yang disampaikan Bu Netty tadi, libatkan Badan POM, Pak, ya. Badan POM kebetulan mitra kita juga dan Badan POM punya perwakilan di setiap provinsi, ada Balai POM dan lain sebagainya. Kan MoU-nya sudah ada, Pak. Sudah pernah buat MoU dengan BGN dan kebetulan di kesempatan ini saya juga ingin menanyakan, setelah MoU ada kerja samanya enggak? Ada *follow up*-nya enggak atau cuma foto-foto dan tandatangan MoU saja? begitu kan? Harapan kita kan enggak. Ini adalah lembaga yang memang ditugaskan untuk memastikan bahwa makanan dan obat-obatan yang beredar di masyarakat kita tuh aman dan layak untuk dikonsumsi sehingga mereka juga pasti ya harus bisa menjalankan tugas tambahan ini, begitu.

Selanjutnya Bapak/Ibu, saya ingin mengajak kita semua untuk bergeser sedikit membayangkan suatu skenario yang berbeda. Skenario yang sudah banyak dijalankan di berbagai negara yang memberikan makan bergizi bagi siswa sekolah.

Bapak/Ibu, Bapak/Ibu,

Coba kita bayangkan suasana sekolah di pagi hari menjelang siang. Di dapur sekolah berkumpul pekerja kantin, pekerja dapur bersama-sama dengan orang tua murid memasak, menyediakan makanan untuk disantap oleh para murid

dan siswa di sekolah itu. Makanan ini jenisnya, menu sudah sebelumnya dibicarakan, didiskusikan, dan disepakati oleh komite sekolah, oleh para orang tua murid bahkan para orang tua murid sudah menerima *checklist* tentang alergi apa saja yang dimiliki oleh anak-anak di sekolah itu. Sehingga apa yang disajikan kepada anak-anak sudah mendapatkan persetujuan komite sekolah, mendapatkan persetujuan orang tua murid, sudah sesuai dengan kearifan lokal, belanjanya di pasar dekat sekolahnya, diawasi oleh orang tua murid, melibatkan orang tua murid, gotong-royongnya ada bahkan dinas kesehatan melalui puskesmas setempat melakukan pengecekan secara berkala ke dapur-dapur sekolah tersebut dan kantin-kantin yang menyediakan makanan. Ini baru gotong-royong, Pak. Ini gotong-royong yang melibatkan komunitas di sekolah itu.

Saya berharap Bapak coba yang saya baru sampaikan ini, mohon coba dipikir ulang, dikaji kembali apakah konsep dan pola ini bisa kita jalankan juga di Indonesia ya. Karena ini bukan konsep yang saya karang, Pak. Ini konsep yang sudah dijalankan di beberapa negara, Pak, termasuk yang mungkin dijadikan contoh oleh BGN hari ini dalam penyelenggaraan MBG. Di Jepang dilakukan ya, di beberapa negara di Eropa juga dilakukan, di Korea Selatan juga dilakukan ya, dan saya rasa akan jauh lebih mudah dan apa mudah dikontrol ketika dapur menyediakan makanan dengan jumlah yang lebih terbatas. Misalnya satu sekolah memasak, satu dapur memasak 80 sampai 100 makanan yang disediakan kepada anak murid di sekolah itu ya, dikontrol oleh orang tua murid. Kalau, Pak, Bapak, kalau Bapak punya anak di sekolah, anaknya disajikan makanan yang enggak enak, yang tidak sehat, pasti kan Bapak komplain sama sekolahnya. Bapak mau terlibat di komite sekolah untuk memastikan anak Bapak makan makanan yang enak, bergizi, lezat, dan sehat begitu.

Jadi, konsep ini tolong dikaji apabila memungkinkan bisa diterapkan di Indonesia, sehingga rencana presiden, mimpi presiden untuk bisa memberi makan anak-anak Indonesia sebanyak-banyaknya, sesingkat-singkatnya bisa segera diwujudkan.

Sekian dari saya. Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pak Charles.

Baik. Saya kira, dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak/Ibu Anggota maupun juga Pimpinan, ya sekali lagi, ini bagian daripada evaluasi karena memang kami melihat Program Makan Bergizi Gratis ini memiliki potensi besar begitu ya untuk bisa meningkatkan status gizi anak-anak Indonesia sekaligus

tentunya juga mendukung bagaimana ekonomi lokal ya, ekonomi rakyat ini bisa berkembang ke depannya.

Tapi memang dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak/Ibu Anggota yang masih banyak perlu dilakukan perbaikan-perbaikan ya untuk bisa membuat program ini jauh lebih berdampak ya, terutama tadi banyak sekali dari anggota yang menyampaikan soal ya, regulasi begitu ya, regulasi ini kan menjadi sebuah pilar utama untuk bisa saya kira segera bisa dibenahi oleh pemerintah ya, agar keberlanjutan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis ini bisa lebih baik lagi.

Termasuk tentunya tadi kalau kita melihat penyerapan anggaran memang yang memang masih sangat-sangat minim ya, tapi kami berharap tadi Pak Kepala sudah menyampaikan paparan skenario-skenario yang akan dijalankan ya dan rencana-rencana ini ya mudah-mudahan bisa benar-benar terealisasi, tapi tentu kami juga menitipkan ya harus ada apa *plan* B-nya ya, kalau memang apa yang sudah direncanakan ya meleset begitu ya, dari yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak. Mungkin saja tadi teman-teman juga menyinggung ya, skema-skema lain ya yang bisa meningkatkan capaian-capaian sambil tentunya membenahi perangkat-perangkat dari Badan Gizi Nasional bisa utuh 100%. Saya kira itu, Bapak Kepala Badan.

Selanjutnya kami persilakan, tapi sebelum Pak Kepala menanggapi apa yang sudah menjadi pertanyaan dari Bapak/Ibu Anggota, ini karena waktu juga sudah melewati dari kesepakatan terakhir, ini jam-jam tanggung sebenarnya, tapi karena memang tinggal, tinggal jawaban dari kepala badan, lalu kita lanjut ke kesimpulan, saya tawarkan kepada Bapak/Ibu Anggota untuk kita lanjut saja sampai jam mungkin 13.00 ya, Bapak/Ibu ya.

Jadi, kami minta mungkin Pak Kepala tidak menanggapi satu per satu dari apa yang disampaikan oleh Bapak/Ibu Anggota, tapi bisa di-*cluster* dari apa tema, judul yang mungkin disampaikan tadi oleh Bapak/Ibu Anggota. Jadi, kita sepakati sampai jam 13.00 ya, Bapak/Ibu ya?

(RAPAT: SETUJU)

Silakan, Pak Kepala, terkait dengan tanggapannya.

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL (Dr. Ir. DADAN HINDAYANA):

Terima kasih, Ibu Pimpinan.

Saya akan berusaha menjawab secara keseluruhan. Saya nanti mohon dilengkapi oleh Pak Waka, Pak Irtama, dan para Deputi, Pak Sestama. Pertama, saya ingin sampaikan terkait dengan regulasi. Sekarang sedang ada dua regulasi yang sedang dikawal, tiga. Satu, perpres terkait dengan tukin. Itu sekarang sudah ada di meja Mensesneg. Jadi, mudah-mudahan sudah tidak terlalu lama lagi

karena saya sudah paraf sehingga teman-teman di BGN akan mendapat tunjangan kinerja sehingga kerjanya lebih intens. Sekarang pun mereka tetap intens karena merah putih di dada. Yang kedua, terkait dengan Perpres MBG yang sedang kita kawal juga sebelum akhirnya nanti ke undang-undang. Yang ketiga, masalah Inpres. Inpres ini menyangkut koordinasi antarlembaga termasuk pemerintah daerah.

Jadi, apa yang disampaikan Pak Heru tadi sudah dicakup dalam inpres tersebut. Meskipun kami masih menunggu, tapi kami sudah melakukan koordinasi. Seperti sekarang misalnya kami intens dengan Kementerian Dalam Negeri untuk bersama-sama pemerintah daerah mempercepat makan bergizi terutama penyiapan infrastruktur dan terutama penyiapan lahan untuk pinjam pakai. Nah, itu semua dikaitkan dengan pemerintah daerah. Ini Pak Tito juga WA untuk melakukan kerja sama lebih intens terkait dengan itu dan saya perlu sampaikan kenapa makan bergizi baru di perkotaan dan di daerah-daerah agregasi? Karena sudah saya jelaskan awal tadi bahwa 1.286 ini betul-betul kemitraan dan sumbangsih para mitra yang tentu saja hitungannya adalah investasi ekonomi. Demikian.

Jadi, di daerah-daerah agregasi telah itulah mereka bersedia karena bagaimana pun investasi dilakukan kan harus kembali. Nah, khusus untuk daerah-daerah terpencil, terluar, tertinggal termasuk pembangunan SPPG di sekolah. Ini kami sedang dalam taraf pembuatan perencanaan melalui konsultan perencanaan yang membangun 1.542 seperti yang ditanyakan tadi oleh Pak Yahya Zaini dan itu baru akan dilaksanakan *tender*-nya kemungkinan besar di pertengahan Mei sampai akhir Mei dan akan dibangun dan baru akan selesai Agustus. Sama seperti saya jelaskan di awal, kalau makan bergizi ini mengandalkan APBN murni, maka Program Makan Bergizi akan bisa dilaksanakan baru bisa dilaksanakan akhir Agustus atau awal Agustus.

Jadi, kenapa kemudian kami melaksanakan dengan pola kemitraan? Karena kami ingin agar program ini tetap berjalan di awal dan di awal tadinya dengan pola *reimburse*, kemudian kami melihat ada hal-hal yang kurang baik dari hal *reimburse*. Di mana ketika mitra mengeluarkan anggaran terlebih dahulu, maka kendali ada di mitra. Nah, kami tidak ingin kendali ada di mitra. Kami *stop* pola *reimburse* sampai bulan ini dan kami usahakan sekarang melalui uang muka di depan, sehingga yang kendalinya ada di Badan Gizi termasuk kontrol, Bu Irma seperti yang disampaikan tadi bahwa kenapa kita berikan uang muka 10 hari di depan? Agar semua yang terlibat di Program Makanan Bergizi betul-betul mengikuti aturan yang sudah diterapkan oleh Badan Gizi dan apalagi penggunaan anggarannya melalui *virtual account*, seperti itu.

Kemudian terkait dengan penyerapan anggaran. Tadi saya sudah jelaskan terkait dengan proyeksi yang akan terjadi. Penyerapan anggaran identik dengan peserta atau penerima manfaat. Semakin besar penerima manfaat, maka penyerapan akan semakin mudah dan tadi saya sudah sampaikan, Agustus kita

akan melayani 22 juta, itu satu bulan akan menyerap 7 triliun. Kemudian September itu sudah akan melayani 42 juta, satu bulan itu sudah 14 triliun. Kemudian Oktober itu akan melayani 66 juta, itu artinya 20 triliun dan ketika nanti November dengan 82,9 juta, itu 25 triliun per bulan, seperti itu. Jadi, dengan anggaran yang ada, Pak Charles, jadi dengan proyeksi yang kita buat bahkan mungkin kita akan perlu tambahan 50 triliun.

Jadi, kami optimis untuk hal tersebut karena pesertanya akan semakin lama semakin besar dan ini semua sarana sekarang sedang antre untuk diverifikasi sehingga kami sangat yakin Agustus kami sudah melayani dengan 7.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi dan kemudian SDM-nya sudah siap karena SDM-nya sedang dididik. Meskipun tadi ada yang menyampaikan terkait dengan transparansi *recruitment* SPPI. Perlu kami jelaskan bahwa untuk *recruitment* SPPI ini, UNHAN yang melakukan, Bu. Jadi, panitianya ada di UNHAN dan kami kemarin memberikan masukan beberapa hal terkait dengan kejadian di mana ada peserta yang sudah lulus kemudian hilang dari daftar lulus dan kemudian akhirnya dipanggil kembali. Jadi, beberapa yang lulus itu dipanggil kembali terkecuali untuk yang data-data kesehatannya memang tidak bisa ditoleransi. Contohnya ada yang penyakit HIV begitu. Itu tidak, tidak bisa kami toleransi. Jadi, meskipun lulus, kemudian dinyatakan tidak lulus karena tes kesehatan ketika kami usulkan lagi tidak bisa ditoleransi karena itu sudah sesuatu yang tidak akan sesuai dengan aturan yang ada, seperti itu.

Kemudian terkait dengan hal evaluasi seperti yang ditanyakan oleh Bu Irma. Kami memiliki target. Begitu 1.994 tercapai, maka kami akan bekerja sama dan sekarang sedang bekerja sama dengan KAN (Kantor Akreditasi Nasional) untuk menyusun kriteria-kriteria, sertifikasi, akreditasi, sehingga nanti SPPG itu akan mendapatkan evaluasi apakah masuk dalam kategori unggul atau kategori baik sekali atau kategori baik dan itu yang akan menentukan juga berapa insentif yang layak diterima. Sekarang ini kami pukul rata sama karena sekaligus memberikan dorongan agar mereka meningkatkan kualitasnya, agar terus meningkatkan fasilitasnya dan nanti begitu sudah kami lakukan akreditasi sertifikasi, maka saat itulah kemudian besaran insentif akan kami tetapkan.

Nah, kemudian di bagian kami sebetulnya untuk pengawasan ada deputi pengawas ya, pemantauan dan pengawasan yang intens. Bahkan Pak Deputi ini hampir tidak pernah di kantor, selalu berkeliling ke seluruh daerah dan demikian juga dengan pegawainya. Selain itu, juga saya punya tim khusus untuk melakukan penghentian begitu, untuk hal-hal yang beberapa penyimpangan, begitu kami mengidentifikasi ada hal yang kurang baik di yayasan terkait terutama terkait dengan implementasi keuangan, saya sudah meminta WPKP untuk uji petik.

Jadi, ini aparat penegak hukum pun sebetulnya sudah kami libatkan dan khusus terkait dengan keracunan, yang kami laporkan adalah yang terverifikasi. Karena ada beberapa laporan di media sosial yang sebetulnya tidak demikian adanya. Contoh seperti di Palembang, ada tiba-tiba yang membuat konten,

dagingnya, ayamnya busuk. Nah, ternyata ceritanya anak itu tidak makan di sekolah, tapi dibawa ke rumah dan kemudian ketika dibuka oleh ibunya di rumah, ayamnya sudah membusuk dan kemudian dibuat konten seperti itu. Jadi, sebetulnya bukan kejadian yang *real*. Ada juga misalnya di Halmahera Barat, tiba-tiba ada ulat di ayam yang sudah selesai dimakan, padahal 3.500 porsi tidak apa-apa. Nah, kemudian setelah diteliti memang sengaja dibuat konten seperti itu.

Jadi, ada hal-hal yang kami cek untuk yang benar-benar terjadi kasus memang ditangani oleh polisi, Pak. Jadi, seperti di Cianjur ditangani polisi, di Bandung, di Tasikmalaya, sekarang di PALI pun polisi ikut campur. Kebetulan di kami ada dua polisi, satu kombes, satu sudah jenderal dan itu selalu intens berkomunikasi dengan para polisi ketika kejadian terjadi. Jadi, yang kami laporkan adalah yang resmi ditangani dan apalagi di Cianjur hasil labnya sudah keluar dan sudah saya sampaikan bahwa seluruh sampel termasuk muntahannya negatif.

Jadi, kemudian yang perlu kami sampaikan evaluasi dan *monitoring* yang kami lakukan. Jadi, kami ini karena memiliki petugas yang tersentralisasi sampai di desa-desa. Setiap jam 3, 4 sore, kami melakukan koordinasi dengan seluruh kepala SPBG di seluruh Indonesia yang kemudian karena sekarang sudah banyak, akhirnya kami bagi hari. Jadi, misalnya hari Senin dengan wilayah Sumatera, kemudian hari Selasa dengan Jawa Barat, kemudian hari Rabu, Jawa Tengah, Jawa Timur, hari Kamis dengan Kalimantan, dan sisanya hari Jumat dengan Wilayah Indonesia Timur. Itu evaluasi yang kami lakukan.

Nah, ini ada sesuatu yang memang dalam hal kejadian di lapangan, anak saya kalau makan tidak benar itu satu jam berikutnya sudah terdampak. Nah, ini kejadian di Cianjur, maupun di Bandung, maupun di Tasikmalaya. Jadi, pada saat petugas ini sedang rapat evaluasi, laporan-laporan itu 4-5 jam ke berikutnya. Jadi, kalau mereka makan jam 12.00, nah laporan adanya insiden itu baru dideteksi jam, jam 5, jam 6. Jadi, memang yang lebih tahu dulu adalah orang tua begitu. Karena sebetulnya kejadiannya 4-5 jam setelah kejadian. Ini yang kami alami di Bandung, di, di Cianjur dan juga di Tasikmalaya.

Nah, kemudian terkait dengan lintas sektoral untuk terutama ibu hamil, ibu menyusui. Memang sekarang di awal ini para SPPG karena yang paling mudah mendeteksi agregasi itu adalah sekolah, maka pertama kali pelayanannya ke sekolah. Nah, ketika SPPG berdiri di satu tempat, maka kemudian petugas SPPG wajib mengidentifikasi berapa ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita yang ada di radius 4 kilometer baru melakukan pelayanan. Dan kami sudah melakukan kerja sama yang intens dengan Kementerian Kependudukan dan BKKBN karena banyak kadernya di posyandu, di daerah-daerah yang selama ini hanya menerima insentif hanya Rp200.000, BGN sudah apa berkomitmen memasukkan kader-kader mereka menjadi penyalur atau membantu BGN di dalam menyalurkan makanan ke rumah masing-masing ke ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita dan BGN akan memberikan insentif ya kurang lebih satu juta lah per bulan sehingga lebih besar dibandingkan yang diterima oleh mereka dari Kementerian

Kependudukan dan Lingkungan dan BKKBN. Jadi, itu bagian-bagian di mana kami melakukan kerja sama antarlembaga termasuk seperti yang ditanyakan Pak Yahya tadi komitmen TNI sedang membangun, Pak, sekarang sedang intens, Polri pun sedang membangun.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si):

Izin, Pimpinan.

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL (Dr. Ir. DADAN HINDAYANA):

Sedang membangun.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Ya, silakan Bu Netty.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si):

Ya, mumpung tadi Pak Kepala sedang membahas tentang kasus-kasus di luar beberapa daerah. Seizin Pimpinan, mungkin kita bisa minta ya Pimpinan laporan investigasi kejadian di berbagai daerah. Jadi, ini sebagai bentuk akuntabilitas, Pak. Termasuk Komisi IX juga bisa membantu menjelaskan kepada masyarakat ya terkait kasus-kasus itu. Karena tadi kan Pak Charles juga menekankan kembali ya ketika saya katakan ada yang tidak dilaporkan, maka ini akan menjadi baik kalau ada laporan investigasi yang diserahkan pada Komisi IX.

Terima kasih, Pimpinan.

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL (Dr. Ir. DADAN HINDAYANA):

Baik, terima kasih. Untuk yang Cianjur saya sudah sampaikan, tapi mungkin nanti akan sampaikan dalam bentuk resminya.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Iya, nanti tertulis, Pak disebutkan.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.):

Pimpinan, Izin tambah, Pimpinan.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Ya, Pak Heru, silakan.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.):

Tadi yang disampaikan, jadi yang keracunan, Pak Kepala Badan, itu harus terus monitor sesuai dengan SOP dokter karena begitu keracunan sekarang ditangani, belum tentu sekarang sembuh, ya. Karena di dalam proses keracunan ini mesti harus monitor. Satu bulan, dua minggu, tiga minggu pada saatnya nanti kalau memang sudah *clear* baru selesaikan dan itu perlu dilaporkan.

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL (Dr. Ir. DADAN HINDAYANA):

Baik, terima kasih.

Termasuk yang di Cianjur, saya kebetulan hadir ke rumah sakit. Di mana mereka dirawat dan pada saat saya datang mereka terus keluar dari rumah sakit dan tadi ada yang menanyakan bentuk perhatian apa yang diberikan kepada yang mengalami. Kebetulan saya bertanya salah satunya adalah orang tua yang jualan bubur yang dua hari tidak bekerja begitu. Nah, itu dari pribadi lah saya mengkompensasi kepada Bapak yang tidak jualan itu. Meskipun saya berikan diam-diam, tapi karena tadi ditanyakan, jadi saya sampaikan kompensasi selama dua hari tidak bekerja itu agar mereka tetap bisa semangat untuk menjaga anaknya yang sorenya setelah saya jenguk terus kembali dan kita melalui petugas kami di lapangan selalu ingin mendapatkan laporan terkait dengan yang mengalami itu dan laporan selalu kami terima terkait dengan bagaimana kondisi anak-anak yang mengalami tersebut. Nanti mungkin saran Pak Heru nanti kami akan catat lebih lama sehingga tidak hanya seminggu, dua minggu mungkin untuk melihat atau memitigasi apa yang sudah terjadi.

Kemudian terkait dengan hal pengetatan, terutama mitra. Jadi, saat ini kami sedang menyusun lebih ketat aturan. Jadi, yang kami perhatikan nanti lebih banyak adalah mitra yang membangun fasilitas karena itu adalah tulang punggung kita, kami yang membangun investasi. Nah, nanti kami sarankan karena proses bantuan pemerintah ini masih harus ada yayasan, maka kami sarankan agar yang memiliki fasilitas memilih memiliki yayasan sendiri atau yayasan yang berafiliasi yang mudah mempertanggungjawabkan segala hal dan dengan adanya penggunaan *virtual account*, saya kira, hal-hal seperti pungutan dan lain-lain dalam waktu yang tidak akan lama mungkin kami akan bisa hilangkan di lapangan.

Saya kira, kalau ada yang menambahkan silakan, kalau ada yang terlewat.

F-P. DEMOKRAT (TUTIK KUSUMA WARDHANI, S.E., M.M.,M.Kes):

Izin, Pimpinan.

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL (Dr. Ir. DADAN HINDAYANA):

Untuk ini, tadi ada bertanya terkait dengan berapa apa ya PPK barangkali atau koordinasi berapa petugas SDM yang bisa melayani SPPG. Perlu kami sampaikan bahwa Badan Gizi Nasional ini sebetulnya memiliki perencanaan membangun kantor pelayanan pemenuhan gizi atau semacam kantor regional yang sampai sekarang ini ada 20. Nah, tidak semua provinsi memiliki kantor pelayanan, tetapi berbasis kepada kepadatan populasi. Seperti contohnya di Aceh, Sumatera Utara satu kantor, tapi Jawa Barat menjadi tiga kantor. Nah, ini mencerminkan SDM yang relevan, yang representatif untuk bisa meng-*handle* semua proses nanti penanganan administrasi keuangan agar ketika jumlahnya sudah banyak sudah terbagi ke dalam kantor-kantor pelayanan pemenuhan gizi yang *insya Allah* dalam waktu dekat 20 kepala kantor ini akan kami seleksi sehingga sejalan dengan meningkatnya SPPG yang terbentuk, maka kantor pelayanan sudah ada.

Nah, kemudian selain itu, kami juga memiliki SPPI yang sudah kami reposisi di antara menjadi koordinator regional untuk masing-masing provinsi sehingga nanti akan memudahkan seluruh komponen di daerah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional. Pak Waka, barangkali ada yang ini, silakan. Iya.

WAKIL KEPALA BADAN GIZI NASIONAL (Mayjen (Purn) LODEWYK PUSUNG):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Salam sejahtera buat kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.*

Yang terhormat Pimpinan, para Anggota Komisi IX.

Atas seizin Kepala Badan Gizi, saya menambahkan sedikit tentang evaluasi yang sudah disampaikan oleh Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Yang jelas kami dari pihak BGN sangat berterima kasih karena memang terus-terang mata dan telinga kami sangat terbatas pada situasi saat ini dan tadi banyak masukan yang tentunya itu berasal dari dapil-dapil dari Bapak/Ibu sekalian dan saya yakin itu benar adanya sehingga ini akan menjadi masukan dan catatan utama bagi kami untuk kami membenahi BGN dan pelaksanaannya ke depan. Sekali lagi terima kasih, luar biasa masukan banyak sekali saya catat, terutama dari Ibu Irma itu luar biasa banyak sekali dan saya merasakan juga itu.

Kemudian ada mungkin yang ingin saya tambahkan, Pak Kepala, yang berkaitan dengan BGN itu tahunya dari media massa. Sebenarnya Ibu, kami

sudah tekankan ke mereka, tapi karena kejadian itu di sekolah, kadang-kadang dengan cepatnya media sosial itu beredar dulu di media sosial si KSPPG ini belum sempat laporan. Padahal kita sudah tekankan agar KSPPG itu kalau ada kejadian itu, dia langsung lapor cepat kepada ini ada deputi tawas ini dan kita memantau terus, tapi karena kecepatan media sosial itu yang memang agak berat terus kita. Terus terang orang-orang intelijen saja kalah sama media sosial sekarang itu harus kita akui, tapi kami tidak menyerah sampai di situ. Kita akan coba lagi meramu ini bagaimana sih *standard operational prosedur* supaya kita tidak kedahuluan oleh media sosial atau media.

Kemudian mungkin saya sampaikan, Pak Kepala, atas izin kepala ini masalah sanksi. Sanksi kepada SPPG yang enggak benar. Ya, memang kalau dia kejadian pertama kayak umpamanya Cianjur, oh ini sudah kita peringatkan. Kalau kejadian lagi ya yang ketiga memang kita harus putuskan kontrak dan ini sudah dirumuskan oleh deputi penyediaan dan penyaluran berkoordinasi terus dengan pemantauan dan pengawasan. Seperti saat ini juga kita punya inspektur utama sudah menurunkan tim untuk memantau di wilayah-wilayah itu, terutama yang kita anggap ya agak-agak rawan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.

Kemudian kontrol makanan. Saya pikir ini masukan yang luar biasa. Memang harus kita bikin *double control* itu, ya. Keluar dari dapur di perjalanan juga dia harus diawasi, kemudian pada saat pembagian kita harus kontrol juga karena takut juga kadang-kadang setelah dibagikan itu ada saja tangan-tangan jahil yang bisa mungkin merusak nama baik BGN itu dan terus-terang kami pantau di wilayah ya. Mohon maaf banyak yang suka, banyak juga yang tidak suka program ini sehingga itu kami berharap kepada teman-teman atau dari Komisi IX ini mari kita sama-sama awasi program presiden ini, program yang sangat mulia.

Kemudian masalah pelibatan, mohon maaf, sudah sosial, masalah sosialisasi memang yang paling luar biasa yang bisa mensosialisasikan ini Bapak/Ibu sekalian, karena saya yakin Bapak/Ibu pasti di dapilnya. Mohon bantuannya untuk lebih mensosialisasikan ini dan tentu mengawasi juga kalau ada SPPG kami KSPPG yang nakal itu mereka juga manusia. Saya yakin ada juga satu, dua yang nakal kita terbuka untuk dikoreksi dan diberikan masukan.

Ini mungkin, Pak Kepala, Ibu Ketua, yang kami hormati. Ada kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

F-PKB (H. ASEP ROMY ROMAYA):

Izin Pimpinan, saya mau menambahkan.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Walaikumsalam.

Oh iya silakan, Pak Asep.

F-PKB (H. ASEP ROMY ROMAYA):

Sebentar. Yang tadi disampaikan terkait ketika SPPG atau dapur tidak sesuai *spec* mutu dan kualitas, sanksi apa yang akan diberikan itu? Buat bukan apa-apa, buat efek jera supaya jaga mutu kualitas untuk makanannya. Itu saja, Pak.

F-PDI PERJUANGAN (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Bu Ketua, iya.

F-P. DEMOKRAT (TUTIK KUSUMA WARDHANI, S.E., M.M.,M.Kes):

Izin.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Iya silakan, Pak Charles. Iya, Pak Charles. Habis itu Bu Tutik, ya.

F-PDI PERJUANGAN (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Saya ingin pertanyaan soal Badan POM dijawab, Pak. Kerja samanya seperti apa sampai sekarang? Apakah mereka yang enggan? Kalau mereka yang enggan entar kita panggil di sini. Kita yang jeter tuh, Pak. Karena mitra kita juga begitu. Disampaikan saja proses yang sudah dijalankan kerja samanya dilakukan atau tidak melibatkan mereka sampai mana.

Ya, terima kasih.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Bu Tutik, silakan.

F-P. DEMOKRAT (TUTIK KUSUMA WARDHANI, S.E., M.M.,M.Kes):

Terima kasih.

Pak Kepala Badan, jadi tadi Bapak bilang perekrutan SPPI oleh UNHAN. Kalau begitu saya titipkan kepada Bapak, Pak. Jadi, kejadian di lapangan seperti itu banyak intervensi dan kualitas daripada kepala dapur seperti apa yang

disampaikan oleh kawan-kawan tadi. Sekian, Pak. Tadi enggak ada yang sakit, kalau yang dari saya enggak ada yang HIV kok, Pak. Ya, terima kasih.

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL (Dr. Ir. DADAN HINDAYANA):

Baik, terima kasih, Ibu.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si):

Izin, Pimpinan.

Mumpung tadi seizin Pimpinan

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Silakan, Bu Netty.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si):

Mumpung tadi Pak Charles menanyakan jawaban soal koordinasi dengan Badan POM itu juga menjadi pertanyaan saya tadi. Sebetulnya kan kerja sama dan koordinasi dengan Badan POM bukan hanya ketika ada kejadian, Pak. Justru standardisasi, kemudian juga sertifikasi tentang mutu dan keamanan pangan itu seharusnya sudah dilakukan ya pada saat kita akan menjalankan program ini. Seperti itu.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Iya. Ada lagi Bapak/Ibu Anggota yang mau menambahkan? Cukup ya?

Jadi, silakan, Pak Kepala.

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL (Dr. Ir. DADAN HINDAYANA):

Baik, terima kasih.

Karena ini baru ya, jadi kami masih dalam taraf penyusunan rencana dan kemudian implementasi untuk seluruh kerja sama. Jadi kita sudah sepakat dengan Badan POM bahwa yang memantau, memitigasi terkait kualitas dan keamanan pangan, nanti yang melakukan Badan POM. Selain mungkin ini akan ada instansi lain atau badan lain yang eksternal yang melakukan, tapi kemudian kami perlu jelaskan juga bahwa di daerah-daerah di mana SPPG ini sudah rutin melakukan pelayanan, maka Dinas Kesehatan selalu melakukan cek terutama terkait dengan aspek higienis dan keamanan pangan. Jadi, bahan baku kami biasanya di cek oleh

Dinas Kesehatan rutin baik itu untuk bahan berbahaya maupun pestisida dan sejauh ini mungkin perlu nanti kami laporkan hasil-hasil pengecekan dari Dinas Kesehatan, bahkan sebetulnya ada di Bojonegoro itu Dinas Kesehatan secara apa, bukan sebuah kelola tapi inisiatif melakukan pelatihan penjamahan, penjamah makanan dan saya kira dengan semakin intensnya kegiatan kita dan inpresnya akan selesai saya kira nanti koordinasinya akan lebih mudah.

F-PDI PERJUANGAN (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Ya, Bu Ketua izin.

Sebelum dilanjut.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Ya, silakan, Pak Charles.

F-PDI PERJUANGAN (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Saya usul, Bapak/Ibu, apabila memang disepakati kita undang saja nanti rapat bersama-sama di sini BGN dengan Badan POM ya. Karena kan Badan POM sudah puluhan tahun terbiasa juga melakukan pengawasan terhadap obat-obatan dan makanan sehingga saya rasa mereka ketika di-*insert* dalam mekanisme yang Bapak-bapak miliki harusnya enggak sulit kok untuk ke depan mencegah kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi. Keracunan, makanan busuk, dan lain sebagainya.

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL (Dr. Ir. DADAN HINDAYANA):

Iya.

F-PDI PERJUANGAN (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Jadi, kita undang bersama-sama di sini dan mudah-mudahan hasil kesimpulan rapat nanti dengan BGN dan Badan POM bisa menjadi pertimbangan ketika nanti diterbitkan inpres atau aturan apa pendukung lainnya ya. Terima kasih.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Iya.

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL (Dr. Ir. DADAN HINDAYANA):

Oke, Pak Charles. Mungkin terakhir Pak Deputi akan menyampaikan atau saya sampaikan?

F-P. GERINDRA (Ir. SRI MELIYANA):

Ketua, Ketua.

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL (Dr. Ir. DADAN HINDAYANA):

Iya.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Iya. Sebentar. Dari Bu Meli silakan.

F-P. GERINDRA (Ir. SRI MELIYANA):

Karena Pak Charles mau mengundang BPOM, apa kita undang BKKBN juga untuk masalah ibu hamil.

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL (Dr. Ir. DADAN HINDAYANA):

Oh iya, kalau itu sudah operasional itu Bu.

F-P. GERINDRA (Ir. SRI MELIYANA):

Oke.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Baik. Jadi, memang kelihatannya ada beberapa kementerian lembaga lain ya, yang mungkin akan bisa di apa dikerja samakan ya dengan BGN dan kebetulan beberapa K/L ini adalah mitra kita ya, di Komisi IX ini. Jadi, saya kira, cukup baik masukannya dari Bapak/Ibu untuk nanti kemudian kita agendakan ya rapat bersama, saya kira antara BGN dengan Badan POM dan juga BKKBN. Mungkin nanti kita coba masuk ke kesimpulan ya untuk diagendakan. Lanjut saja, Pak Kepala, silakan kalau masih ada.

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL (Dr. Ir. DADAN HINDAYANA):

Mungkin ada dua jawaban terakhir. Yang pertama, terkait dengan mengambil bahan baku langsung dari petani, itulah sebetulnya tujuan kami. Jadi, jika ada memang *aggregator* yang bisa menjamin petani lebih baik, saya kira itu mungkin juga bisa di apa di fasilitasi, tapi jika ada petani yang juga langsung jualan ke kami karena ini sudah operasional itu juga dimungkinkan. Karena dengan pola bantuan pemerintah kan apalagi dengan *virtual account* kita bisa langsung belanja ke siapa saja. Itu salah satu keunggulan bantuan pemerintah karena tidak harus e-katalog. Jadi, siapa pun bisa langsung dibeli oleh petugas di lapangan.

Yang kedua, terkait dengan pelatihan penjamah makanan yang sudah kami jelaskan sudah terjadi di, di Banten, di Cianjur, di Jakarta, di Bandung, di Garut. Itu, Pak Charles, salah satu yang memberikan materinya adalah dari BPOM. Jadi, BPOM sedang terlibat dan bahkan BPOM terlibat di awal ketika SPPI dilatih. Jadi, terkait untuk awal memberikan pemahaman terkait dengan higienis dan keamanan pangan, BPOM sudah rutin dengan kami dalam pelatihan-pelatihan untuk penjamah makanan. Mungkin nanti lebih operasional dalam kaitan dengan pengawasan rutin di SPPG. Nah, itu mungkin nanti akan ada mekanisme-mekanisme di mana bisa saja ada kerja sama intens terutama hal terkait dengan penggunaan dana bersama untuk hal tersebut. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan.

Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu/Bapak sekalian yang sudah memberikan apresiasi dan juga masukan-masukan yang luar biasa dan kami catat nanti akan kami balas dengan jawaban tertulis disertai dengan laporan-laporan dari lapangan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Baik. Terima kasih, Pak Kepala, atas jawaban dan juga tanggapan yang sudah diberikan atas pertanyaan dari Anggota dan juga Pimpinan Komisi IX DPR RI.

Selanjutnya kita masuk ke dalam draf kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Badan Gizi Nasional. Bisa ditampilkan ya, Sekretariat Komisi? Iya, saya bacakan dan saya tawarkan terlebih dahulu ke Bapak/Ibu Anggota Komisi IX untuk disetujui, ya.

Draf Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Badan Gizi Nasional pada hari ini, Selasa 6 Mei 2025.

Yang pertama.

1. Komisi IX mendesak Badan Gizi Nasional untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dan segera melakukan langkah-langkah perbaikan sehingga ada akselerasi realisasi anggaran tahun 2025.

Bagaimana Bapak/Ibu bisa kita sepakati poin nomor satu? Sepakat ya?

(RAPAT: SETUJU)

Oke. Lanjut, 2.

2. Komisi IX DPR RI meminta Badan Gizi Nasional untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas seluruh kasus Kejadian Luar Biasa atau KLB yang terkait dengan program-program intervensi gizi termasuk kegiatan kejadian keracunan makanan dan kekurangan gizi akut, serta memastikan adanya sistem pelaporan dan respons cepat yang transparan dan akuntabel.

Disetujui Bapak/Ibu?

(RAPAT: SETUJU)

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Iya, silakan, Pak Heru.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.):

Untuk itu bukan KLB, karena KLB itu ada aturan lagi. Jadi, kalau KLB secara menyeluruh ya, jadi itu tidak KLB. Jadi, kejadian jangan di, KLB-nya dihilangkan, dihilangkan, kasus kejadian yang terkait itu saja ya dengan program intervensi gizi.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Iya, iya, iya. Kalau KLB itu ada standar besaran kejadiannya ya.

Oke. Jadi, saya baca ulang ya, Bapak/Ibu.

2. Komisi IX DPR RI meminta Badan Gizi Nasional untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas seluruh kasus kejadian yang terkait dengan program-program intervensi gizi termasuk kejadian keracunan makanan dan kekurangan gizi akut, serta memastikan adanya sistem pelaporan dan respons cepat yang transparan dan akuntabel.

Sepakat, Bapak/Ibu? Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Lanjut, nomor 3.

3. Komisi IX DPR RI mendesak Badan Gizi Nasional untuk meningkatkan tata kelola investasi di sektor gizi dengan fokus pada akuntabilitas, transparansi,

dan keberlanjutan program, serta memastikan sinergi dengan kementerian, lembaga terkait dan pemerintah daerah.

Bagaimana, Bapak/Ibu? Sepakat poin nomor 3? Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Oke, lanjut. Nomor 4.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si):

Izin, izin Pimpinan saya.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Iya, Bu Netty silakan.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si):

Agak terlewat tadi yang nomor 3.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Nomor, nomor?

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si):

Nomor 2 tadi ya kasus kejadian itu ya? Apa namanya tetap saja kita perlu juga meminta BGN untuk berkoordinasi dengan apa ya pihak pemerintah daerah terkait layanan kesehatan. Karena kemarin kejadian di Cianjur itu juga apa cukup membuat fasilitas kesehatan itu harus bekerja keras seperti itu.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Ya, bahasanya bisa di redaksinya bagaimana nih? Diselipkan. Oke.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si):

Iya.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Oke, saya baca ulang ya? Poin nomor 2, kesimpulan nomor 2.

2. Komisi IX DPR RI meminta BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas seluruh kasus kejadian yang terkait dengan program-program

intervensi gizi termasuk kejadian keracunan makanan dan kekurangan gizi akut, serta memastikan adanya sistem pelaporan, koordinasi dengan pemerintah daerah, dan respons cepat yang transparan dan akuntabel.

Begitu ya, Bu Netty ya? Oke. Nomor 3 tadi disetujui ya Bapak/Ibu?

(RAPAT: SETUJU)

Oke, lanjut nomor empat.

4. Komisi IX DPR RI meminta BGN untuk mengkaji alternatif model penyelenggaraan penyediaan MBG termasuk skema pelibatan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, pangan lokal, mekanisme pengawasan berbasis masyarakat, serta penggunaan *platform* digital untuk transparansi, distribusi, dan pelaporan guna memastikan efektivitas, keberlanjutan, dan ketepatan sasaran program.

Ini disepakati, Bapak/Ibu?

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Ya, silakan, Pak Heru.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.):

Untuk Komisi IX meminta BGN untuk mengkaji alternatif modal penyelenggaraan penyediaan MBG termasuk skema pelibatan usaha mikro kecil menengah, UMKM pangan lokal dengan mekanisme yang singkat. Jadi, mekanisme yang lebih praktis.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Bagaimana, bagaimana, Pak Heru? Bisa konkret saja redaksinya.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.):

Jadi, penyediaan MBG termasuk skema pelibatan usaha mikro menengah kecil, menengah, penggunaan bahan lokal dengan mekanisme pengawasan. Sebelum mekanisme itu, pelibatan dengan UMKM dengan sistem administrasi yang lebih mudah. Jadi, UMKM bisa melakukan partisipasinya tidak melalui beberapa skema yang sulit. Artinya apa yang disampaikan Pak Kepala Badan tadi,

bisa langsung, jadi mereka mau berpartisipasi bisa langsung. Nah, inilah yang perlu dimasukkan.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Terkait dengan sistem administrasi yang lebih mudah begitu ya?

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.):

Iya.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Coba ditambahkan administrasi.

F-PDI PERJUANGAN (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Bu Ketua.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Ya, masih ada? Silakan, Pak Charles.

F-PDI PERJUANGAN (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Saya usulkan, ini kan alternatif model. Mengkaji ya, mengkaji alternatif model penyelenggaraan penyediaan MBG termasuk skema pelibatan sekolah.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Oke. Ya.

F-PDI PERJUANGAN (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Ini kan mengkaji kan? tidak apa langsung dijalankan, tapi mengkaji kemungkinan-kemungkinan begitu kan. Jadi, saya rasa, enggak ada salahnya untuk dimasukkan.

F-P. GOLKAR (M. YAHYA ZAINI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IX):

Kalau tidak perlu mengkaji bagaimana, Pak Charles? Langsung mengikutsertakan?

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL (Dr. Ir. DADAN HINDAYANA):

Sebetulnya sudah dilaksanakan, Pak. Sekolah yang melaksanakan sudah ada.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Oke. Jadi, memang sudah ada ya.

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL (Dr. Ir. DADAN HINDAYANA):

Jadi, memang sudah ada. Jadi, di Bogor itu bahkan kantin berubah jadi SPPG dan pendapatannya meningkat tajam karena tidak hanya melayani sekolah itu, tapi juga melayani sembilan sekolah lainnya. Jadi, memang sudah ada model itu dan memang itu untuk sekolah-sekolah yang secara infrastruktur siap dan kami nanti dengan dana APBN sedang mengkaji bagaimana sekolah lain bisa siap.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Baik, jadi mungkin bahasanya bukan mengkaji, tapi mungkin meningkatkan, karena memang hari ini sudah ada yang berjalan. Hanya saja memang yang untuk ya, sama sih saya kira untuk UMKM juga perbaikan sistem administrasi untuk bisa di lebih ditingkatkan juga ya. Jadi, kita pakai kata-kata meningkatkan?

F-PDI PERJUANGAN (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Bu Ketua, begini, *sorry*, izin saya potong. Kalau ini kan begini, memang yang disampaikan Pak Kepala tadi melibatkan sekolah, tetapi berbeda dengan konsep yang tadi saya sampaikan bagaimana sekolah itu melayani sekolah itu sendiri begitu kan. Kalau yang tadi yang Pak Kepala sampaikan adalah satu sekolah menjadi SPPG melayani sepuluh sekolah tetap menyediakan 3.000 makanan begitu kan. Sedangkan ini alternatif yang kami coba sampaikan untuk bisa dikaji ya satu sekolah tetap menyelenggarakan hanya untuk sekolahnya saja, melibatkan orang tua murid ya kan? Termasuk orang tua murid diberikan *checklist* apakah anaknya alergi terhadap bahan makan tertentu, sehingga ya penyelenggaranya pasti jauh lebih aman dan bisa diterima baik dari sisi rasa maupun keamanan ya bagi peserta didik di sekolah itu.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Ya, ini. Jadi, memang mekanisme yang berbeda dari apa yang sudah dijalankan hari ini ya. Saya enggak tahu ini tepat untuk dimasukkan bersama poin 4 atau kita buat poin tersendiri.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.):

Izin, Ketua.

Jadi, lebih baik apa yang disampaikan Pak Charles ini poin tersendiri karena perlu dikaji. Karena ini adalah skema baru.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Oke.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.):

Mendesain skema baru.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Iya-iya.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.):

Lah kalau itu memang memungkinkan, ada dua. Yang satu SPPG, yang sebagian yang jauh yang kata perlu, perlu waktu yang lama dengan sekolah tadi. Mungkin ada nomor baru, tapi perlu dikaji, Pak. Ini hanya untuk memberikan apa salah satu usul, betul, Pak.

F-PDI PERJUANGAN (CHARLES HONORIS/WAKIL KETUA KOMISI IX):

Izin, Bu Ketua.

Termasuk mungkin saya, saya tidak mau membatasi hanya sekolah ya, kita *benchmarking* ke berbagai negara lain yang sudah menjalankan. Kalau memang ada pola lain yang boleh dikaji, kenapa tidak begitu kan. Maksud saya tuh ya, tidak ada yang tidak bisa diubah lah, Pak. Semua opsi harus tetap dibuka, yang penting program ini harus bisa berjalan dengan efektif dan efisien begitu sehingga yang, ya saya ingin menawarkan kalau dibuat poin tersendiri ditulis sekolah boleh, tetapi tidak tertutup hanya pada sekolah, begitu.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Iya. Jadi, ya mungkin itu nanti bisa poin tersendiri saja ya, Pak Charles ya?

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.):

Sebetulnya kalau dimasukkan ke sana lebih *anu*, Pak. Enggak apa-apa asal ada mengkajinya. Jadi, itu betul mengkaji alternatif model penyelenggaraan dan penyediaan itu termasuk sekolah dan lain-lain. Jadi, dimasukkan saja.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Oke.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.):

Ya.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Ya, yang *existing* biar tetap berjalan, tapi siapa tahu ada kajian lain ya, apa skema lain terkait dengan pelibatan sekolah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Charles begitu ya. Jadi, poin nomor 4 bisa kita sepakati ya? Redaksinya seperti ini Bapak/Ibu Anggota. Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Oke. Lanjut. Poin nomor lima.

5. Komisi IX DPR mendesak Badan Gizi Nasional memperkuat tata kelola komunikasi publik Program Makan Bergizi Gratis guna meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program termasuk menyediakan kanal pengaduan dengan langkah tindak lanjut yang jelas dan transparan.

Disepakati, Bapak/Ibu, poin nomor 5?

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si):

Setuju, setuju.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

(RAPAT: SETUJU)

Setuju ya? Baik. Lanjut poin nomor 6.

6. Komisi IX DPR RI mendesak BGN untuk segera membangun dan mengimplementasikan sistem *surveillance* yang lebih efektif dengan tujuan untuk:

- a. mendeteksi dan melacak setiap kejadian keracunan makanan secara *real time* sehingga BGN dapat segera mengetahui dan menangani setiap insiden dengan cepat;
- b. mengintegrasikan sistem *surveillance* ini dengan pemeriksaan rutin, serta pengawasan ketat di setiap tahap Program MBG mulai dari pengadaan hingga distribusi makanan guna memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disajikan;
- c. mengoptimalkan koordinasi dan pelibatan aktif kementerian/lembaga terkait untuk memastikan respons yang cepat dalam menangani kasus keracunan makanan dan mencegah penyebaran lebih lanjut.

6 a, b, c bisa disepakati, Bapak/Ibu Anggota?

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.):

Izin.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Ya, Pak Heru, silakan ada masukan?

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.):

Jadi, yang a itu mendesak dan melacak setiap kejadian keracunan makanan yang secara *real time* sehingga BGN dapat segera mengetahui dan menangani setiap insiden dengan cepat. Namun demikian, bukan hanya melacak, tapi juga memantau sesuai dengan SOP kedokteran. Jadi, berapa bulan pada tidak saat itu selesai di keracunan, saat itu sembuh, tapi bulan-bulan berikutnya harus dipantau sesuai dengan SOP.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Artinya harus dievaluasi maksudnya begitu ya?

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.):

Ya, evaluasi SOP Kedokteran.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Iya, sesuai dengan standar penanganan. Ya, saya baca ulang ya.

6a. "Mendeteksi dan melacak setiap kejadian keracunan makanan secara *real time* sehingga BGN dapat segera mengetahui, menangani setiap insiden dengan cepat, dan melakukan evaluasi sesuai standar penanganan medis."

Begitu, Bapak/Ibu? Cukup? Sepakat ya? 6a, 6b, 6c.

F-P. NASDEM (NURHADI, S.Pd., M.H.):

6c.

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Oh, Pak Nurhadi, silakan.

F-P. NASDEM (NURHADI, S.Pd.,M.H.):

“Mengoptimalkan koordinasi dan pelibatan aktif kementerian atau lembaga terkait.” Ini saya memberi masukan juga melibatkan pemerintah daerah, dalam hal ini dinas kesehatan. Selama ini, kita kan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis ini juga melibatkan mereka. Contoh, dokter dari Dinas Kesehatan dikirim juga ikut memberikan edukasi ke masyarakat. Namun, ketika ada permasalahan mereka seolah lepas tangan. Ini urusan pusat begitu lho. Lah karena mereka juga kalau bahasa Jawa *ne wong* pemerintah daerah ini kurang *diwongne* begitu, Pimpinan. Intinya mohon izin bisa dilibatkan untuk pemerintah daerah.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Iya. Untuk pelibatan pemerintah daerah itu sebenarnya tadi ada di poin 3, di poin 3, Pak Nurhadi. Jadi, perbedaannya dengan poin 6, ini kita lebih kepada BGN-nya untuk bisa melakukan apa namanya ya punya sistem lah ya untuk terkait dengan kejadian-kejadian yang mungkin terjadi ke depannya begitu atau mau diulang lagi dengan ditambahkan lagi juga enggak apa-apa juga. Jadi, berulang sebenarnya. Iya, ditambahkan di poin c ya? Memperkuat apa yang ada tadi di poin nomor 3 sebenarnya. Boleh begitu ya Bapak/Ibu Anggota ya?

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si):

Setuju.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Oke. Baik. Nomor, poin nomor 6 disepakati ya?

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya kesimpulan nomor 7.

7. Komisi IX DPR mendesak BGN untuk berkoordinasi dengan BPOM RI untuk memastikan bahwa setiap mitra yang terlibat dalam Program MBG memenuhi standar keamanan pangan yang ketat dengan mengutamakan pengawasan terhadap kualitas bahan makanan, proses pengolahan, dan distribusi makanan.

Ini disepakati ya, Bapak/Ibu? Sesuai tadi masukan ini.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si):

Sepakat.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Iya, Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Kesimpulan nomor 8.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si):

Izin, izin, Ketua.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Iya.

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si):

Saya enggak tahu, apakah diksi evaluasi itu sudah memuat tadi ya, usulan beberapa anggota tentang pentingnya audit berkala, ya. Karena saking banyaknya SPPG ini, tentu kita juga perlu melakukan audit berkala pada tata kelola SPPG ini. Kira-kira sudah memuat belum? Tadi ada, kalau di atas kan evaluasi secara menyeluruh. Itu mungkin dilakukan oleh BGN, tapi kalau audit berkala kita melibatkan pihak-pihak, pihak lain ya seperti itu. Ada enggak?

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Mau di, ditambahkan di poin nomor 2. Iya, Bu Netty, ya?

F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si):

Iya.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Ya, ini audit perlu ditambahkan pihak-pihaknya? Iya, secara sistem kelembagaan pasti memang ada audit rutin yang, yang dilakukan oleh eksternal ya. Iya, internal dan eksternal. Ya, enggak perlu disebutkan lah ya, karena memang sudah ada ininya. Baik, itu ditambahkan di poin nomor 2.

F-P. GERINDRA (Ir. SRI MELIYANA):

Ketua.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Iya, Bu Mel.

F-P. GERINDRA (Ir. SRI MELIYANA):

Yang poin nomor 2 itu koordinasi dengan pemerintah daerah dulu baru adanya sistem pelaporan, supaya sistem pelaporan *connect* dengan audit berkala dan respons cepat dan transparan.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Oh iya, *oke*, urutannya saja ini. Sistem pelaporannya setelah audit begitu ya? *Oke*.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.):

Dan itu bagian komprehensif harus melaporkan pada Komisi IX yang kita tahu.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Itu nanti ada di kesimpulan yang nomor 8, Pak.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.):

Terakhir? Iya, terima kasih.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Ya. *Oke*. Saya ulangi ya, poin nomor 2 kita ketuk ulang.

2. Komisi IX DPR RI meminta BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas seluruh kasus kejadian yang terkait dengan program-program intervensi gizi termasuk kejadian keracunan makanan dan kekurangan gizi

akut, serta memastikan adanya koordinasi dengan pemerintah daerah, audit berkala, sistem pelaporan, dan respons cepat yang transparan dan akuntabel.

Sepakat ya nomor 2 ya, Bapak/Ibu?

(RAPAT: SETUJU)

Lanjut tadi nomor 7 sudah di ketuk ya.

Nomor 8.

8. Komisi IX DPR RI meminta Badan Gizi Nasional untuk menyampaikan laporan tindak lanjut atas kesimpulan rapat hari ini paling lambat 30 hari kerja sebagai bentuk akuntabilitas publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program MBG dan juga meminta BGN memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI pada rapat dengar pendapat hari ini paling lambat tanggal 14 Mei 2025.

Setuju, Bapak/Ibu?

(RAPAT: SETUJU)

Oke. Selanjutnya kami serahkan, kami persilakan kepada Kepala Badan Gizi Nasional untuk mengoreksi, ya, draf kesimpulan yang sudah disepakati oleh Bapak/Ibu Anggota. Poin satu?

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL (Dr. Ir. DADAN HINDAYANA):

Poin nomor 1 saya kira oke, enggak ada masalah.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Oke, kita setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Poin draf kesimpulan nomor 2?

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL (Dr. Ir. DADAN HINDAYANA):

Ini juga oke.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Setuju? Iya.

(RAPAT: SETUJU)

Draf kesimpulan nomor 3?

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL (Dr. Ir. DADAN HINDAYANA):

Nomor 3, *oke*, Bu. Ya, ini karena memang sudah dalam program kami. Jadi, tidak ada masalah.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Oke, 4?

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL (Dr. Ir. DADAN HINDAYANA):

Nomor 4. Bahkan sebetulnya skema pelibatan sekolah *kan* sudah ada dalam konsep kami ketika pertama kali presentasi di Komisi IX. Jadi, tidak ada masalah juga.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Iya, tapi ini mengkaji alternatif model yang mungkin akan ada yang lain, Pak, ya. Jadi, bisa disepakati, ya?

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL (Dr. Ir. DADAN HINDAYANA):

Ya.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Poin 5, Pak.

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL (Dr. Ir. DADAN HINDAYANA):

Setuju karena itu memang sedang kami kuatkan.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Baik.

(RAPAT: SETUJU)

Lanjut kesimpulan nomor 6.

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL (Dr. Ir. DADAN HINDAYANA):

Setuju.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Kesimpulan nomor 7.

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL (Dr. Ir. DADAN HINDAYANA):

Nah, nomor 7 ini ada PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Jadi, mungkin di sini ada koordinasi BPOM harus dipisahkan terkait dengan kewenangan sesuai dengan PP tersebut.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

PP? Keamanan Pangan.

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL (Dr. Ir. DADAN HINDAYANA):

Keamanan Pangan Nomor 86 Tahun 2019.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Bisa ditambahkan.

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL (Dr. Ir. DADAN HINDAYANA):

Terkait koordinasi BPOM harus dipisahkan kewenangannya sesuai dengan PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Tahun 2019.

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL (Dr. Ir. DADAN HINDAYANA):

2019, 2019.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Tentang Keamanan Pangan. Oke, iya. Cukup ya, nomor 7 kita sepakati ya?

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL (Dr. Ir. DADAN HINDAYANA):

Iya.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Oke. Nomor 8?

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL (Dr. Ir. DADAN HINDAYANA):

Sangat setuju.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Oke. Siap.

(RAPAT: SETUJU)

Baik. Iya, untuk nanti rapat gabungan, ya, antara Badan Gizi Nasional, Badan POM, dan juga BKKBN mungkin tidak perlu dimasukkan ke dalam kesimpulan, tapi kami akan jadi *concern* Komisi IX untuk bisa kami agendakan selanjutnya. Terima kasih, dengan adanya koreksi dan persetujuan Bapak/Ibu Anggota, draf kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Badan Gizi Nasional kita putuskan untuk bisa menjadi kesimpulan ya rapat pada hari ini ya.

(RAPAT: SETUJU)

Dan akhirnya, tentunya kami atas nama Pimpinan dan juga Anggota Komisi IX DPR RI mengucapkan terima kasih dan ya permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami tentu sekali lagi mendukung segala upaya-upaya perbaikan evaluasi yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional untuk bisa memastikan Program Makan Bergizi Gratis ini berjalan sesuai dengan apa yang memang menjadi visi dan misi Presiden Prabowo.

Sebelum kami, rapat kami akhiri, tentu kami persilakan kepada Bapak Kepala Badan Gizi Nasional untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai penutup. Silakan.

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL (Dr. Ir. DADAN HINDAYANA):

Baik. Terima kasih, Ibu Pimpinan.

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita telah selesai mengadakan rapat dengar pendapat dengan masukan yang luar biasa, apresiasi yang kami hargai, dan juga kesimpulan yang saya kira ini sejalan dengan apa yang sedang dan akan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan secara simbolis Buku Sosialisasi Makan Bergizi yang dilakukan antara BGN dan Komisi IX yang sudah kami persiapkan.

Terima kasih kepada Ibu/Bapak sekalian, terutama Pimpinan Komisi IX.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat siang,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Shalom,

Om swastyastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Baik. Terima kasih, Pak Kepala.

Boleh nanti diserahkan bukunya, tapi tentunya sebelumnya ya dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* dengan terselenggaranya rapat dengar pendapat kita pada hari ini dan sudah me, apa menyimpulkan ya beberapa hal. Ya, sekali lagi mudah-mudahan ini bisa terus mendukung apa yang memang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional ya. Untuk itu, rapat saya nyatakan ditutup.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.33 WIB)

**a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT**

Ttd

**Ida Nuryati, S.Sos., M.A.
NIP.197604011998032002**